



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
KOMISI VI DPR RI
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM DENGAN SERIKAT PEKERJA
INDOFARMA**

- Tahun Sidang : 2024-2025
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : -
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 28 Agustus 2024
Waktu : Pukul 14.36 s.d.16.13 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI,
Gedung Nusantara I Lt. 1
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Martin Manurung, S.E., M.A.
(Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-P. Nasdem)
- Acara : Menerima Audiensi/Masukan dari Serikat Pekerja
Indofarma
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si.
(Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI)
- Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI:**
12 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F-PDIP)**
1 dari 12 orang Anggota
1. Sondang Tiar Debora Tampubolon
- 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)**
3 dari 8 orang Anggota
1. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.
2. Ir. H. Mohamad Idris Laena
3. Doni Akbar, S.E., M.M.
- 3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA
RAYA (F-P. GERINDRA)**
2 dari 8 orang Anggota

1. Mohamad Hekal, M.B.A.
2. Ir. H. La Tinro La Tunrung

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-P. NASDEM)

2 dari 6 orang Anggota

1. Martin Manurung, S.E., M.A.
2. H. Subardi, S.H., M.H.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

1 dari 6 orang Anggota

1. Siti Mukaromah, S. Ag. M.A.P.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

2 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Ir. Herman Khaeron, M.Si.
2. Hj. Melani Leimena Suharli

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

1 dari 4 orang Anggota

1. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

0 dari 4 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

0 dari 2 orang Anggota

B. UNDANGAN:

Serikat Pekerja Indofarma beserta jajaran

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Mari kita mulai, mungkin nanti bisa, sebenarnya kita sudah terima suratnya, *tapi* baik juga ada RDPU seperti ini supaya kami bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi *concern* dari kawan-kawan di Serikat Pekerja Indofarma, yang nanti bisa kita jadikan masukan saat rapat bersama dengan



Menteri BUMN atau dengan *holding*, apa, farmasi ya, namanya, istilahnya, *Holding Farmasi BUMN*.

Baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

F-PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON):

Walaikumsalam,

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Salam sejahtera buat kita semua,

Yang terhormat kawan-kawan atau Ibu Sondang Tampubolon, Anggota Komisi VI DPR RI,

Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ketua Umum Serikat Pekerja Indofarma, Saudari Meida Wati beserta rombongan,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita semua saat ini bisa melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dalam keadaan sehat *walafiat*.

Dapat kami sampaikan, sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), di mana memang RDPU seperti ini tidak, hak, tidak ada aturan tentang kuorum Pak, jadi tetap RDPU itu berlangsung dengan sah ya. Maka, izinkan saya membuka rapat pada hari ini dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.36 WIB)

Sesuai agenda rapat pada hari ini adalah Komisi VI DPR RI menerima audiensi dari Serikat Pekerja Indofarma (SP-Indofarma). Sebagaimana yang telah saya katakan tadi, pada tanggal 4 Juni 2024, Komisi VI DPR RI telah menerima surat permohonan audiensi dari Pengurus Serikat Pekerja Indofarma (SP-Indofarma), terkait adanya permasalahan penundaan kewajiban perusahaan bagi karyawan yang dilakukan pihak perusahaan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaan PT Indofarma Global Medika.

Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Saudara Ketua Umum Serikat Pekerja Indofarma untuk menyampaikan paparan. Mungkin bisa disampaikan secara singkat saja apa yang menjadi *concern* dan kami sudah terima yang lengkapnya secara tertulis di sini ya. Jadi bisa

disampaikan poin-poin, apa, keprihatinannya secara singkat. Kami persilakan kepada Ketua Umum Serikat Pekerja Indofarma.

KETUA UMUM SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (MEIDA WATI):

Ya, terima kasih Pak Martin Manurung dan Ibu Sondang atas kesediaan waktunya bersama kami untuk menerima aspirasi kami dan keluhan kami terhadap, terkait dengan permasalahan yang ada di karyawan Indofarma. Namun terlebih dahulu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, saya sebagai Ketua Serikat, Ketua Umum Serikat Pekerja Indofarma, nama saya Meida Wati. Dan di sebelah kiri saya ada Pak Sekretaris Jenderal, Pak Zaenudin. Dan sebelah kanan saya adalah Ketua Penasehat, Pak Ridwan Kamil. Ada juga Kabiro Komunikasi, Pak Agus Pujo Laksono. Dan Ketua Biro Konseling Advokasi, Pak Ahmad Furqon. Lalu ada Ketua Kaji, Ketua Biro Kajian Strategis, Pak Mursal. Dan Ketua Kabiro Kesos, Pak Arif Widodo. Dan Ketua 2, Pak Jepri Usnandar. Dan sebagai anggota adalah Pak Syaiful Bachri, Bu Renny Laili, Pak Sunaryo, Pak Yudo Nugraha, Pak Marzuki, dan Pak Satrio Wicaksono, itu adalah kami yang ada di, yang mengikuti rapat ini. Dan untuk paparannya, silakan Mas Furqon.

BIRO KONSELING & ADVOKASI SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (AHMAD FURQON):

Izin.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Selamat siang dan terima kasih kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI Pak dan juga Anggota Komisi VI DPR RI. Izinkan kami memaparkan beberapa hal yang memang, apa namanya, menjadi *concern* kami di Indofarma terkait dengan kekaryawanan, karena memang kami dari Serikat Pekerja Indofarma itu *concern* terhadap kekaryawanan yang kaitannya dengan perusahaan itu sendiri.

Baik, kita mulai saja, *next*, izin, kami kenapa menyampaikan judul di sini adalah "Ratapan Karyawan Indofarma Group Meminta Haknya Dibayarkan", karena di sini kalau kami melihat dari serikat pekerja, bahwasanya karyawan itu punya hak-hak yang memang harus dipenuhi oleh perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja bersama. Namun, sampai saat ini masih banyak hak-hak kami sebagai karyawan yang belum bisa dipenuhi oleh manajemen ataupun perusahaan Indofarma. Makanya, izinkan di sini kami menyitir atau mengambil sebuah ayat dalam Al-Qur'an, izin untuk yang beragama Islam, yaitu surat Al-Baqarah ayat 188, di mana "Janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang *bathil*, dan (janganlah) kamu membawa urusan harta itu

kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan atau berbuat dosa), padahal kamu mengetahui hal tersebut”.

Baik, dari sini, kalau kami lihat bahwasanya sebenarnya kami dari Serikat Pekerja Indofarma itu punya garis perjuangan dari *dulu* sampai sekarang tetap, dengan dua *itikad* atau dua garis besar perjuangan kami. Karena mustahil bahwasanya kami, adanya serikat pekerja, adanya karyawan, kalau tidak ada perusahaan. Maka dari itu, poin pertama garis perjuangan kami adalah selamatkan perusahaan kami, selamatkan Indofarma Group. Dan yang kedua, tentu saja, kami sebagai serikat pekerja, harus *concern* juga terhadap hak-hak karyawan. Maka, poin kedua dari garis perjuangan kami di serikat pekerja adalah selamatkan hak-hak karyawan. Ini menjadi poin penting garis perjuangan kami. Jadi, bukan kami *sekedar* merongrong, kami meminta, tidak, *tapi* kami juga mengetahui bahwasanya kami SP, tidak akan pernah ada jika tidak ada perusahaan. Dan begitu pun karyawan, tidak akan pernah ada hak-haknya dan segala macamnya, jika tidak ada perusahaan. Maka, dua poin ini merupakan poin perjuangan kami dengan didirikannya SP Indofarma dari awal.

Oke, *next*, ini hanya *sekedar* sekilas saja. Kami juga di SP melihat beberapa momentum atau sekilas terkait pendirian Indofarma. Yang pertama, berdiri sejak 1918. Berarti, sebenarnya Indofarma ini sudah cukup *sepuh* dibilang, sudah 1 abad lebih, 106 tahun, itu berdiri tahun 1918, lalu 1981 *dirubah* status perusahaan menjadi Perum, di mana dengan Perum ini, Indofarma *dulu* dilakukan penunjukan untuk pengadaan obat yang sifatnya nasional, penunjukan ya. Lalu 1990 karena lahan di Manggarai atau di, apa namanya, daerah Tambak itu sudah tidak memenuhi atau sudah tidak cukup ruangnya, maka di dipindahkanlah pabrik Indofarma itu ke daerah Cibitung, dengan luas tanah kurang lebih 20 *hektar*. Berarti memang benar, cita-cita awal pendirian Indofarma adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan obat secara nasional.

Berikutnya tahun 1996, didirikanlah perseroan terbatas karena kami *semakin* besar. Di 2021 itu, dibukakanlah IPO, kami membuka saham, PT Indofarma Tbk. 2020, terbentuklah *Holding* BUMN Farmasi.

Nah, ini kenapa juga *Holding* BUMN Farmasi ini merupakan titik strategis di mata kami rekan-rekan di SP, kenapa, karena sebenarnya kami berharap dengan terbentuknya *holding* itu, kami yang memang ibarat kata tujuannya untuk nasional, bisa lebih besar lagi, bisa lebih memberikan sumbangsih yang besar untuk negara.

Tapi pada kenyataannya, kalau kita lihat nanti *trend*-nya, bahwasanya dengan berdirinya *holding*, malah Indofarma ini sendiri secara grup, secara entitas sendiri, itu makin lama makin turun performanya atau kinerjanya.

Itu yang kenapa kami *concern* 'kok 2 ini menjadi poin strategis'. Sebenarnya kami diawal didirikan itu pengennya menjadi lebih besar, *tapi* begitu di *holding*, kami makin, kinerjanya makin turun, makin turun, ada apa *gitu*.

Berikutnya, strukturnya sendiri, tadi sudah dilihat bahwasanya kita itu punya Pemerintah Indonesia, Biofarma selaku *holding*, Asabri sebagian kecil, dan masyarakat. Di mana Indofarma punya anak, Indofarma Global Medika dan juga punya cucu, Farmalab.

Ini kalau yang tadi saya bilang bahwasanya kinerja, kita lihat semenjak pendirian *holding* di 2020, itu *bottom line* Indofarma atau keuntungan yang diperoleh Indofarma makin lama makin turun, makin tergerus, begitu pun dengan *revenue*. Kalau 2021, 2021 itu kenapa bisa meningkat drastis, karena memang ketika itu Covid dan kami banyak dipercaya oleh pemerintah untuk mengadakan obat-obat terkait Covid, *gitu*.

Ya, *next*, sekilas saja. Kalau kita lihat juga, karena kami serikat pekerja, maka kami juga melihat dari sisi kekaryawanan, bagaimana kalau sebuah perusahaan makin berkembang, makin maju, niscaya jumlah karyawan itu akan makin meningkat.

Tapi pada kenyataannya, kita lihat semenjak pembentukan *holding* di 2020, tidak pernah ada grafik naik, baik di Indofarma sendiri, maupun Indofarma Global Medika selaku anak kami, begitu. Dilihat di sini, dari 2020 1.272 orang yang bekerja untuk Indofarma, saat ini, per 2024 Mei itu, 861 orang, berarti cukup jauh penurunannya. Ditambah lagi, kalau kita lihat di 2023 ke 2024, itu hampir 200 orang berkurang, karena apa, memang dirasakan di tahun-tahun terakhir ini, 2024 terutama dari Januari, itu ketidaknyamanan kami sebagai karyawan mulai, apa namanya, mulai bertambah, kondisinya itu bertambah parah, begitu.

Oke, ini kalau kita melihat lagi kondisi Indofarma, yang terjadi sebenarnya kalau kita lihat, *next slide*-nya, secara detail, ini 2023, eh 2003 maaf, Indofarma itu pertama kali mengalami kerugian, sebesar 129 miliar. Ini kenapa, karena tadi, bahwasanya kita yang *dulu*-nya Perum ditunjuk oleh Pemerintah, *tapi* 2023 itu subsidi kepada kami Indofarma dicabut. Maka, itu *kan* harus ada perubahan atau, apa namanya, penyesuaian dalam pola bisnis yang dilakukan oleh Indofarma. Akhirnya pada 2023 itu, kami mengalami kerugian sebesar 129 miliar. Ditambah lagi, pembelian atau selisih kurs yang memang menjadi masalah, karena kita sama-sama tahu, bahwasanya dunia farmasi itu dominan adalah proses impor untuk bahan bakunya.

Lalu 2013, ini juga terjadi adanya Permenkes pemberlakuan e-katalog. Selama ini memang Indofarma ketika awal ditunjuk untuk *support* pemerintah.

Lalu sebelum ada e-katalog juga masih bisa bekerja sama dengan bebas karena memang penunjukan dari pemerintah, lalu 2013 ini, dengan adanya e-katalog, maka dibukalah pasar bebas dengan swasta-swasta. Padahal kita sama-sama tahu, Indofarma ini dibikin untuk skala-skala besar. Sementara e-katalog kalau kita perhatikan, bahwasanya harganya *semakin* murah. Lalu selain itu juga, skalanya juga, tidak, kalau, kalau kita bilang bahwasanya *minimum order quantity* untuk Indofarmanya itu tidak bisa, tidak memenuhi, sehingga kalau kita jual dengan jumlah minim, yang ada kita makin rugi.

Akhirnya, Indofarma sendiri ya akhirnya keteteran nih, SKU-nya dari 2013 sampai sekarang, tidak pernah ada kenaikan, cenderung turun yang dimenangkan e-katalog. Padahal kalau kita boleh jujur, Indofarma itu 80% adalah produknya produk tender, memang untuk produk tender.

Lalu 2013 sampai sekarang, tadi yang saya sudah bilang, bahwasanya Indofarma terus mengalami kerugian kecuali 2019 dan 2020, itu pun keuntungannya sangat-sangat minim, alias tipis sekali. 2020, tadi kita dari SP *concern* bahwasanya 2020 adalah kita berharap titik balik, Indofarma bisa lebih besar lagi, bisa bangkit kembali, *tapi* ternyata dengan pembentukan *holding*, Indofarma diminta *shifting*, berubah, yang asalnya bergerak di bidang farma menjadi alkes dan herbal.

Nah, ini akhirnya kalau dilaksanakan dengan segera ketika itu, membuat Indofarma cukup terguncang. Karena tidak mudah *merubah* bisnis yang asalnya farma menjadi alkes dan herbal. Akhirnya, ya kita sama-sama tahu, makin lama makin tergerus.

2020-2022, ini juga menjadi *concern* SP ketika itu, kenapa? Karena terjadinya rangkap jabatan manajer akuntansi dan keuangan di Indofarma serta IGM. Nah ini yang kita sampaikan, bahwasanya potensi itu sebenarnya sudah kita lihat, yaitu potensi terjadinya *fraud* kalau adanya rangkap jabatan di Indofarma maupun IGM.

2020-2023, berdasarkan hasil audit investigasi BPK, ditemukan adanya dugaan praktik *fraud* di Indofarma sebesar 371 miliar. Dan piutang bermasalah anak perusahaan, PT IGM, sebesar 470 miliar. Itu pun sebagian besar produk Covid yang tidak terserap oleh konsumen, yang berakibat produk tersebut akhirnya sampai sekarang *expired* di gudang Indofarma. Akhirnya 2024 Indofarma, ya?

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Contohnya apa *tuh*?



**BIRO KONSELING & ADVOKASI SERIKAT PEKERJA INDOFARMA
(AHMAD FURQON):**

Contohnya.

**KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI
VI DPR RI):**

Yang tidak terserap.

**BIRO KONSELING & ADVOKASI SERIKAT PEKERJA INDOFARMA
(AHMAD FURQON):**

Oseltamivir Pak, produknya Ivermectin, itu banyak, terus Desrem, itu contoh, beberapa contohnya Pak. Lalu 2024, izin lanjutkan, 2024, Indofarma mengalami gugatan PKPU. Selain itu, semenjak 2024 pun, Indofarma Group sudah tidak sanggup lagi membayarkan gaji karyawan dengan penuh, itu yang terjadi kondisinya. Namun, kami melihat sebenarnya, *kok* teman-teman SP tadi, kalau balik lagi kedua poin tadi, bahwasanya kami *concern* dengan operasional Indofarma agar terus berkembang dan juga hak-hak karyawan. Contohnya, kami bisa menekan di sini, apa saja sih pengorbanan yang sudah karyawan lakukan agar Indofarma ini bisa tetap operasional, bisa tetap berjalan, bisa lebih besar lagi.

Kami menyadari Indofarma memang ketika dari 2013 ke sini, itu makin lama makin turun. Maka di 2017, ketika manajemen memutuskan bahwasanya tidak ada kenaikan inflasi, *which is* kalau kita bilang bahwasanya kalau tidak ada kenaikan inflasi adalah, ya kita standar gaji kita menjadi turun, ya *kan*. Nah itu kami terima, kami tidak ada ribut-ribut, karena apa, kami sadar Indofarma kondisinya tidak sedang baik-baik saja, maka kami masih bisa terima.

2018, lagi-lagi, inflasi kami hanya dinaikkan sebesar 50.000 per orang. Jadi, makin turun saja kualitas pendapatan yang karyawan terima. Berikutnya, 2021 hingga 2024, upah yang dipotong untuk DPLK, DPLK ini adalah dana pensiun yang dijaminan lembaga keuangan, itu tidak disetorkan kepada lembaga keuangan, *tapi* statusnya sudah dipotong dari, dari gaji karyawan, dari upah karyawan, dari 2021 hingga 2024. Lalu selain DPLK, yang krusial sebenarnya di poin ini, dari 2022 hingga 2024, dari upah karyawan juga sudah dipotong untuk BPJS tenaga kerja, tetapi lagi-lagi, belum disetorkan oleh perusahaan.

Yang berikutnya, poin berikutnya adalah tahun 2022 sampai 2024, pesangon karyawan itu, baik yang pensiun normal maupun pendi, belum bisa dipenuhi pembayarannya oleh perusahaan. 2023, tunjangan kesejahteraan, tunjangan akhir tahun serta tunjangan pendidikan yang memang sudah ada

dalam perjanjian kerja bersama kami, itu juga belum dibayarkan hingga saat ini.

Ini yang akhirnya tahun 2024, membuat kami meringis, merasa sakit luar biasa, pengorbanan apalagi yang dibutuhkan, bahwasanya upah yang kami terima itu tidak diterima secara utuh, tidak 100%, dimulai dari, tidak kami, ada beberapa bulan yang kami tidak digaji, ada juga yang gradasi, ada yang hanya *sekedar* 50% dari pendapatan yang harusnya kami terima, begitu.

Itu dimulai dari Januari 2024, makanya ada beberapa pergerakan dari teman-teman SP yang lakukan, karena apa, kalau yang atas-atas mungkin kita masih bisa nerima bahwasanya, oh iya ini adalah sekunder atau tersier dari pendapatan kami. *Tapi* kalau yang di 2024, itu adalah pendapatan primer kami, sehingga kalau dari situ, kita melihat bahwasanya total yang sampai saat ini nih yang belum digantikan atau diutangkan oleh perusahaan kepada kami karyawan di Indofarma sendiri, sebesar 65 miliar, 30 miliar di IGM. Jadi, total Rp95 miliar, *gitu*.

Dari Januari sampai ke sini, inilah dampak yang memang akhirnya dirasakan oleh karyawan. Apa? Kebutuhan hidup seperti membeli beras, lauk-pauk, kebutuhan hidup dasar lainnya tidak lagi terpenuhi dengan layak. Pembayaran listrik dan air tertunda, kebutuhan rutin, pendidikan anak seperti *transport*, iuran sekolah, dan tempat tinggal tidak bisa terpenuhi, jaminan kesehatan karyawan terutama untuk karyawan yang sudah pensiun, tidak bisa digunakan lagi, karena apa, karena iuran BPJS kesehatan untuk pensiunan Indofarma yang memang ada dalam PKB dijaminan oleh perusahaan, itu diputus sepihak oleh perusahaan.

Berikutnya, yang terakhir adalah karyawan mengalami penurunan kesehatan, baik fisik maupun mental. Ini bahkan kalau boleh jujur, sudah banyak dari karyawan kami yang mengalami *stroke*, bahkan kemarin pun ada kecelakaan kerja ditanggung oleh kami sesama karyawan, *gitu*.

Lalu, apa saja sih sebenarnya langkah-langkah kami di serikat pekerja yang sudah kami lakukan untuk kami bantu Indofarma biar keluar dari masalah ini, maupun kami juga sekaligus berkeluh kesahlah, beraudiensi, dan segala macam. Pertama, SP Indofarma sendiri tentu saja yang harus kita komunikasikan dengan manajemen, bagaimana kita coba keluar dari masalah-masalah yang dihadapi Indofarma. Ini sudah sering kali, berapa kali jumlahnya mungkin sudah cukup banyak, dari 2021, 2022, 2023 sampai sekarang, itu sudah sering kami berkomunikasi, beraudiensi dengan manajemen, baik Indofarma maupun IGM. Lalu komunikasi juga dengan perwakilan karyawan, jadi kami buka jembatan antara karyawan langsung dengan manajemen, tidak melalui kami, itu juga sudah kami lakukan. Ada juga audiensi antara pengurus SP dengan *holding*, kami dengan *holding* juga sudah kami coba lakukan.



Lalu semenjak 2024 ke sini, kami juga *intense* dengan Dinas Tenaga Kerja, “Bagaimana ini solusinya seperti apa?”. Lalu selain itu juga, di akhir-akhir ini, kami memang rutin melakukan bipartit antara manajemen dengan SP Indofarma. Tak ketinggalan juga, karena kami adalah milik negara, kami coba beraudiensi dengan Kementerian BUMN melalui Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan Kementerian BUMN Republik Indonesia.

Di Januari dan bulan Maret, ya? Itu kami melakukan unjuk rasa. Januari dan Mei itu kami melakukan unjuk rasa, tujuannya apa, karena kami ngerasa, “*Kok* selama ini audiensi itu tidak, tidak pernah, istilahnya ketika itu kami kesulitan untuk beraudiensi dengan pihak-pihak tertentu”, makanya kami melakukan unjuk rasa agar kami, kalau bahasa, mohon maaf, bahasa orang awamnya adalah kami didengar. Karena kami sudah merasa ini kebutuhan primer kami sudah dipotong, kami enggak bisa lagi nih, kami, dan kami tidak tahu harus menjerit ke mana, akhirnya itu langkah yang kami lakukan selaku serikat pekerja.

Lalu, kami juga di bulan Mei itu tidak hanya ke Kementerian BUMN, kami melakukan unjuk rasa juga ke Istana Negara dan *alhamdulillah* diterima oleh KSP. Di situ diterima oleh KSP, Kantor Staf Kepresidenan, dan kami sampaikan beberapa paparan di sana. Lalu selain itu, kami juga coba mengadu ke Komnas HAM, seperti apa, dan terakhir mungkin yang saat ini kita lakukan, yaitu rapat dengar pendapat umum dengan Komisi VI DPR RI.

Ini berikutnya hanya, istilahnya kami gambarkan bahwasanya yang kami paparkan adalah memang benar terjadi. Ini unjuk rasa 31 Mei, unjuk rasa 6 Mei 2024 ke KSP dan Kementerian BUMN, ini kita berdiskusi dengan Kemenaker, sangat rutin. Terus ini dengan *holding* sekaligus Serikat Pekerja Bio Farma, kami juga coba diskusi.

Oke, ini adalah usulan, apa sih yang kami usulkan, kami tidak serta-merta menuntut, *tapi* kami coba usulkan gagasan atau beberapa usulan yang ada di kami Pengurus Serikat Pekerja Indofarma, yaitu Indofarma Group diusulkan untuk diselamatkan dengan memberikan *bailout*, karena kalau kita lihat saat ini posisinya, Indofarma itu sudah *negative equity*, antara aset dengan utang, jumlahnya lebih besar utang ya, kenapa kami meminta *bailout* itu, karena kami melihat bahwasanya sejarah panjang Indofarma. Indofarma ini memang dibentuk untuk sistem kesehatan, ketahanan kesehatan nasional, yang memang skalanya skala besar. Di lain pihak, bahwasanya sebenarnya kalau kita tidak kekurangan modal, modal kerja, produk-produk Indofarma itu masih *market-able*, masih bisa kami jual, begitu.

Yang kedua, kami meminta bahwasanya segera dibayarkan pengorbanan yang sudah selama ini karyawan lakukan. Terutama pemotongan dari hak-hak karyawan yang dilakukan semenjak bulan Januari

2024 yang totalnya tadi saya sampaikan, bahwasanya jumlahnya kurang lebih 95 miliar. Dan kami minta, kenapa seperti itu, karena kami sudah berutang di mana-mana. Kalau mendengarkan keluh kesah teman-teman di lapangan, karyawan Indofarma yang lain, bahwasanya mereka sudah berutang ke mana-mana. Entah mukanya mau disimpan di mana lagi, kita enggak, enggak tahu. Makanya kita usul untuk dibayarkan secara tunai, karena itu adalah keringat kami yang sudah kami keluarkan, *tapi* sudah kering keringatnya, sampai saat ini belum kami terima pembayarannya.

Lalu yang ketiga adalah penyelamatan Indofarma Group jika memang diperlukan dengan pendekatan *right sizing*. Kami pun bisa terima itu. Karena kami sadar, Indofarma itu memang kapalnya sudah tidak besar lagi, walaupun ada konsekuensi harus *right sizing*, maka, atau pensiun dini, yang digulirkan oleh manajemen Indofarma Group, kami juga siap untuk berdiskusi. Bahkan kami pun sudah memberikan proposal dari tahun 2023 kepada Indofarma jika memang akan mengadakan *right sizing*, pengurangan jumlah karyawan, kami sepakat tidak sesuai dengan PKB yang jumlahnya bisa kita bilang 4,5 kali dari PKB, kami sepakat, oke, proposal kami kita turunkan, untuk mem, apa, meringankan beban Indofarma, cukup tiga kali. Namun, sampai saat ini belum ada diskusi dengan manajemen untuk besaran, apa, pembayaran pesangon terkait *right sizing* tersebut.

Yang keempat, kami meminta, karena ini juga sudah menjadi rahasia umum bahwasanya ada oknum di Indofarma Group kemarin yang memang berdasarkan audit BPK itu terlibat *fraud*, kami juga menekankan bahwasanya pejabat dan mantan pejabat di Indofarma serta IGM yang diduga melakukan *fraud*, agar segera dilakukan penindakan terhadap mereka. Karena kalau kami lihat bahwasanya sampai saat ini, cukup berlarut-larut kasusnya.

Yang terakhir, evaluasi atas kinerja *Holding* BUMN Farmasi, karena hingga saat ini manfaatnya, kalau kami lihat bahwasanya, secara kami Indofarma, itu belum dirasakan manfaatnya secara *real gitu*, karena apa, yang tadi saya sampaikan bahwasanya Indofarma itu malah cenderung *decrease*, turun terus.

Terakhir dari kami, ratapan kami karyawan Indofarma, kami butuh makan dan menyekolahkan anak kami, kami berharap Komisi VI DPR RI dapat membantu perjuangan karyawan Indofarma Group agar hak-hak karyawan dibayarkan oleh negara, yang terutang senilai 95 miliar dengan dibayarkan secara kontan dan tidak di cicil secara, selama 10 tahun. Kami merasa bahwasanya negara harus hadir untuk menyelesaikan masalah ini, karena kami juga adalah milik negara.

Yang kedua, bila terjadi *right sizing* dan karyawan dirasionalisasikan, agar mendapatkan pesangon yang layak dan manusiawi. Kami siap untuk berdiskusi, kami mengharap bahwasanya karyawan yang sudah rela



berkorban untuk Indofarma, tidak mendapatkan hanya kulit dan tulang saja. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya SP Indofarma sudah mengajukan proposal sebesar tiga kali, *tapi* belum ada perundingan dengan pihak manajemen.

Terakhir, harapan yang memang sangat kami harapkan, semoga di akhir masa jabatan, seperti yang tadi disampaikan, dari Anggota DPR RI Komisi VI menjadi ladang amal baik untuk membantu kami berjuang selaku karyawan Indofarma Group. Terima kasih, mungkin itu yang dapat kami sampaikan.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, *makasih* kepada Serikat Pekerja Indofarma, saya persilakan Bu Sondang kalau ada tanggapan.

F-PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pak Martin Manurung, beserta dengan Seluruh Bapak/Ibu yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indofarma,

Yang saat ini sekarang menjadi *holding* dari BUMN Farmasi, yaitu di bawah Bio Farma, begitu ya? Iya.

Bapak-Ibu sekalian, terima kasih sudah memberikan surat pengajuan rapat dengar pendapat umum dan ini memang juga adalah salah satu bagian dari fungsi kami sebagai Anggota DPR RI khususnya di Komisi VI, mendengarkan masukan-masukan dan aspirasi masyarakat, terutama dari mitra-mitra kerja kami, termasuk juga dengan Serikat Pekerja Indofarma.

Sebetulnya kami di Komisi VI ini, sudah lama ya, cukup lama mendengar daripada bagaimana kinerja Indofarma yang dari tahun ke tahun memang, sejak kami mulai di di, menjabat dari 2019 sampai dengan hari ini, tidak mengalami perbaikan yang cukup signifikan dan kami, ini sebagai laporan juga kepada Bapak/Ibu, bahwa kami dari Komisi VI pun terus-menerus melakukan rapat kerja atau RDPU juga kepada perusahaan BUMN yang tergabung dalam industri farmasi, baik dari Bio Farma dengan juga *holding-holding*, *subholding* di bawahnya, termasuk Indofarma. Kami juga melihat bahwa bagaimana perkembangan Indofarma ini dari tahun ke tahun, termasuk dalam Covid juga.

Nah, tadi kalau Bapak, saya, maaf lupa namanya, menjelaskan bahwa, bagaimana kinerja dari 2017, 2018, 19 sampai dengan 2024, itu cukup



memprihatinkan, ya. Terutama, tadi pada saat yang dijelaskan kepada kami, bahwa di 2020 sampai dengan 2023, ada praktik *fraud* di Indofarma sebesar 371 miliar terhadap yang sebagian besar produk Covid yang tidak terserap oleh konsumen yang berakibat produk tersebut *expired*. Ini sangat ironis sekali, 2020 sampai dengan 2023, kita semua sebagai masyarakat Indonesia itu sangat sangat-sangat sulit sekali mendapatkan yang namanya produk-produk untuk menanggulangi Covid, termasuk saya sendiri, keluarga saya sendiri, sangat sulit sekali. Tadi apa produknya saya enggak tahu, ada Ivermectin, ada azid, segala macam itu, Ivermectin itu *kan* obat cacing yang bisa, apa namanya, *side effect*-nya yang di, yang diambil. Itu keluarga saya Pak, satu, beberapa keluarga untuk mencari yang namanya Ivermectin di 2020 sampai 2023, aduh, di Jakarta Pak, Jakarta, sangat sulit sekali, ini sangat ironis sekali *gitu loh*, keadaan ini dengan yang Bapak/Ibu laporkan. Sebenarnya harusnya kalau seperti itu, Bapak/Ibu juga kurang cepat untuk melaporkannya kepada kami *gitu loh*, baru sekarang *gitu loh*, apa namanya, apa namanya, masuk ke dalam Komisi VI.

Sehingga, kalau misalnya 2022 dan 2023 kemarin sudah dilaporkan kepada kita, pasti itu akan kita langsung tindak lanjuti supaya bagaimana itu obat tersebut bisa terserap kepada konsumen dan kerugian daripada Indofarma ini tidak berlarut-larut seperti itu. Nah, ini sangat memprihatinkan.

Tetapi, saya sebelum kepada hal-hal yang lain, tadi *kan* dari 2017 sudah melihat tanda-tanda bahwa Indofarma ini akan menuju kondisi yang seperti sekarang. Beberapa kali *kan* sudah ganti ya direktur utamanya ya, apa, direksinya ya.

Nah saya mau tanya, dari 2000, saya enggak tahu dari 2017 karena kami tidak tidak, apa namanya, kami tidak menjabat pada saat itu. Dari 2019 sampai dengan 2024 ini, dengan kondisi perusahaan seperti ini, seperti apa operasional perusahaan yang terjadi dalam Indofarma? Apakah ada pembatasan produksi? Ataukah ada pembatasan daripada operasional perusahaan dan lain sebagainya? Dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Indofarma, apa? Karena *kan* tadi dari, saya lihat dari jumlah kinerja, jumlah karyawan ya, itu setiap tahun kalau enggak salah berkurang terus *tuh*, mana dari halaman berapa tadi, *hah*, halaman enam ya, sebentar, halaman, nah, ini *kan* berkurang terus *tuh*, dari 2020, 1272 sampai dengan sampai 2024, 861. Saya *ndak* tahu, dari 1272 sampai 861 ini pengurangan karyawannya ini supaya sebagai sebagai bahan evaluasi begitu Pak, apakah dengan pengurangan karyawan tersebut membuat efisiensi dan efektivitas daripada perusahaan, dengan kinerja operasional yang sekarang dengan penjualan, apakah sebanding? Nah, nanti bisa dijawab ya, supaya kami bisa membawa hal-hal ini, kepada nanti dengan, rapat dengan, baik itukah BUMN *Holdings*-nya, maupun dengan Indofarmanya.

Nah, kemudian dari 1271 sampai 861, kurang lebih ada 400 karyawan tersebut, bagaimana hak-hak yang sudah dibayarkan oleh perusahaan? Nah itu boleh di, apa namanya, boleh dijawab nanti. Nah kemudian juga, kalau merujuk kepada Undang-Undang Cipta Kerja dan juga Peraturan Pemerintah mengenai, apa namanya, Pengurangan PHK ataupun mengenai tentang Pailit ataupun PKPU. Sebetulnya, perusahaan karena ini persero, mengacu kepada Undang-Undang Persero juga, yang perlu diselesaikan pertama kali itu adalah hak-hak daripada karyawan ya, itu mengacu kepada Undang-Undang dan PP Nomor 35 Tahun 2021. Dan ini kita harus sampaikan betul-betul kepada Indofarma, bahwa hak-hak daripada karyawan ini harus pertama kali di selesaikan.

Nah, sekarang ini *kan* sudah enggak bayar lagi karya, bayar lagi karyawan nih pekerja, operasional perusahaan berarti saat ini seperti seperti, seperti apa? Boleh dijabarin sama kita, berapa pabrik yang bekerja? Kemudian berapa karyawan yang aktif setiap hari bekerja dan lain sebagainya, kemudian boleh juga dijabarin kepada kita, aset, mungkin enggak tahu ya Serikat Pekerja Indofarma ini, aset yang dimiliki Indofarma sekarang ini ada berapa? Karena kalau dia menghadapi PKPU dan itu nanti pailit ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, yang harus pertama kali diselesaikan adalah ya, apa namanya, hak-hak karyawan, baru nanti utang-piutang kepada pihak yang lain, baru kemudian yang lain-lain yang baru diselesaikan oleh, apa namanya, perusahaan. *Tapi* mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Martin, supaya bisa nanti kita bisa bahan masukan kepada rapat dengan Bio Farma sebagai *Holding* BUMN dari Indofarma, terima kasih.

Assalamualaikum,

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, *makasih* Bu Sondang.

Sebelum saya kembalikan, serak nih, ke kawan-kawan di serikat pekerja, saya ingin menyambung dikit dari Ibu Sondang dan juga dari paparan di kawan-kawan tadi. Kalau Serikat Pekerja Indofarma itu punya dua kepentingan atau dua yang harus diperjuangkan, di Komisi VI kami punya tiga Pak. Jadi, bukan hanya perusahaan dan hak-hak karyawan, *tapi* juga negara, karena apa pun yang menjadi kebijakan, itu akan berdampak kepada keuangan negara, *kan gitu*, satu ya.



Nah, terus kedua, kalau dari paparan Bapak-Ibu sekalian, saya lihat tadi kalau dikatakan pembukaan e-katalog itu kemudian memberikan masalah kepada Indofarma, berarti ada juga kondisi di Indofarma, di mana produk-produk yang dihasilkan atau *sales*-nya atau apa pun namanya, yang tidak bisa *compete* dengan swasta, ini harus digarisbawahi juga.

Jadi, kalau tadi Bu Sondang mengatakan, kenapa juga, apa ya, baru sekarang sampai ke sini, ya itu juga penting. Jadi, pertama memang dari sisi *competitiveness* perusahaan juga berarti ada masalah.

Terus yang kedua, saya setuju dengan Bu Sondang tadi, kalau produk Covid tidak terserap, Oseltamivir-lah, apa itu semua, kita cari, justru pada saat pandemi Covid itulah ya, banyak industri farmasi itu yang memperoleh keuntungan yang banyak sekali ya, *windfall profit gitu*. Nah, kalau Indofarma bermasalah ketika Covid, itu kan aneh, ya.

Terus yang ketiga, ketika terjadi *fraud*, nah ini kita perlu juga informasi dari dalam, apa yang sebenarnya terjadi di Indofarma, ya *kan*. Karena kita perlu nih sekarang informasi dari kawan-kawan, tahu enggak ketika ada *fraud* itu? Dan apakah Serikat Pekerja Indofarma atau kawan-kawan yang ada di Serikat Pekerja Indofarma ini sudah melakukan langkah apa? Karena sebenarnya, kalau kondisi Indofarma itu memang sudah, katakanlah menurun, *tapi* kalau tidak karena *fraud* terjadi, sebenarnya masih ada napas-napas dikitnya.

Nah sekarang kami perlu, mumpung lagi ketemu kawan-kawan di sini, cerita dong sama kami dalam forum ini, supaya ini jadi bahan masukan kepada kami ketika rapat, baik dengan Menteri BUMN maupun dengan *Holding Farmasi*, kami perlu. Jadi, justru informasi itulah yang tidak bisa kita dapat, ini *kan* yang kita tahu cuma berita-berita di media, ya *kan*.

Nah kawan-kawan, seperti apa nih fungsi kontrolnya juga? Nih manajemen lagi melakukan *fraud kan* pasti tahu dong, ini bahaya dong bagi kondisi keuangan perusahaan. Nah cerita di sini, *gapapa*, kami perlu tahu itu, mengerti enggak maksud saya? Ya *kan*?

Nah, kita juga perlu tahu, ketika ketemu dengan *holding* itu, apa yang mereka katakan? Ketika tadi itu pertemuan dengan *holding*. Nah, *holding* ini *kan* enggak bisa juga tinggal diam atau berpangku tangan terhadap permasalahan yang dihadapi Indofarma.

Nah, karena itu kami perlu informasi-informasi dari kawan-kawan serikat pekerja ini, karena terus terang kalau kami tidak tahu secara *detil*, kalau secara *detil* finansial kita tahu karena ada audit, ada apa, *tapi* apa yang terjadi di Indofarma ini, kok bisa *tuh*, kita kaget setengah mati, ketika ada minjam ke pinjol, gila itu, perusahaan apa itu kayak begitu.

861 orang karyawannya, yang melakukan *fraud* ini berapa orang? Kalau yang ada di berita kan, *hah?* 12, nah berarti 840 berapa sih, *hah?* Iya ngapain *tuh*, *hah?* Iya kan, 861 ya, kok matematika saya habis kongres lagi bego nih, kurang 12 berarti 9, 5, 4, 849 orang ini ngapain *aja tuh* waktu *fraud* itu, karena itu bukan cuma sekali loh kalau kita ingat paparannya *holding* itu, dan bukan dalam waktu singkat, bertahun-tahun ya? Bertahun-tahun. Nah, kita perlu itu Pak, apa yang terjadi, kalau waktu itu takut ya sekarang jangan takut, apalagi.

DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (JUSUP IMRON DANU R):

Pak, mohon izin.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Entar *dulu* Pak, entar, nanti Bapak dapat kesempatan *ngomong*.

DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (JUSUP IMRON DANU R):

Siap, siap.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya kan? Apalagi Pak? Jadi, tolong kasih tahu sama kami, supaya kami juga punya senjata ketika memperjuangkan hak Bapak-bapak. Ini *kan* enggak bisa sekonyong-konyong Bapak minta *bailout* begini, enggak bisa, ya kan? Kita harus mencari nanti nih, apa formula-formulanya, jalan tengah dan segala macamnya seperti apa, itu yang nanti harus kami cari. *Tapi* kami perlu tahu, yang membuat bangkrut nih perusahaan ini siapa? Penegakkan hukumnya *begimana?* Itu kami perlu tahu Pak ya, kalau enggak, enak *aja*, bikin bangkrut perusahaan habis itu minta duit ke negara, *weh*, gawat itu, ya.

Jadi saya rasa itu Pak dari saya. Nanti tolong kami diberikan informasi lebih dalam ya. Kalau dari sisi, apa, penundaan ini, tidak pembayaran ini dan segala macam, tentu kami sangat prihatin di situ ya. Dan nanti kami akan mencari jalan keluarnya, baik kepada *Holding Farmasi*, nanti tolong cerita juga *Holding Farmasi* itu ngomong apa waktu Bapak-bapak ketemu ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kami akan cari jalan keluarnya, baik kepada *Holding Farmasi* maupun kepada Menteri BUMN ya. *Tapi* kami juga perlu tahu BUMN Indofarma ini, hancurnya ini, apa yang terjadi, saya rasa itu dari saya,

saya kembalikan ke kawan-kawan serikat pekerja. Silakan Ibu Ketua, atur siapa yang mau menjawab.

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (RIDWAN KAMIL):

Terima kasih Pak Martin, selaku Pimpinan Rapat.

Salam kenal, saya Kamil Pak, saya Kamil, iya betul sama namanya, iya daftar, mudah-mudahan menang. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari Serikat Pekerja Indofarma, apa namanya, Pak Martin yang terhormat, Ibu Sondang, terima kasih atas, apa namanya, pertanyaannya. Menurut saya pertanyaan cukup bagus juga ya, bahwa kita memang datang ke sini ingin menyampaikan aspirasi, sekaligus ingin menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh Serikat Pekerja Indofarma selama ini.

Tadi pertanyaan dari Ibu Sondang bahwa pada tahun 2000, terutama dari tahun 2019 ya sampai dengan 2023, kinerja Indofarma kan terus menurun ya, dan ini bertepatan dengan terbentuknya *Holding* BUMN Farmasi pada tahun 2019 ya, yang operasionalnya tahun 2020. Di mana pada saat pembentukan *Holding* BUMN Farmasi, Indofarma diberi tugas baru Pak, Pak Martin, yang sebelumnya bisnis kita adalah di farma yang sudah 10 dekade nih, 100 tahun, kita mengerjakan farma, kemudian tiba-tiba kita disuruh *shifting* ke herbal sama ke alkes. Nah, di situ justru, kebetul, di situ justru awal mulanya kinerja Indofarma kemudian terus mengalami penurunan, ya, karena kita secara tidak langsung, disuruh meninggalkan farmanya ya, karena pada waktu itu, dianggap kita beririsan dengan Kimia Farma ya, jadi kita me, me, apa namanya, me, menangani bisnis baru, herbal sama alkes, yang farmanya ditinggalkan. Dan ini bisa dilihat, bahwa kinerja kita selama 2019 sampai dengan 2023 terus mengalami penurunan ya dan mengalami *negative profit* ya, *margin* kita merah ya, apa namanya, *rapot* -nya ya, ruginya gede, malah tahun 2022, kerugian kita sampai dengan lebih dari 400 miliar. 2023, 700 miliar ya, *audited* -nya, dan, apa namanya, ini berdampak sekali terhadap kondisi karyawan ya. Dan tadi disampaikan ya sama Pak Furqon, bahwa memang dengan kinerja Indofarma yang terus mengalami penurunan, kemudian kita juga *bottomline* -nya terus negatif, otomatis hak-hak karyawan pada akhirnya terganggu.

Nah, kalau pertanyaannya, kenapa ini Indofarma sebegitu menurunnya ya, di samping memang, saya enggak tahu ya, apakah memang kebijakan pembentukan *holding* ini, apa namanya, menyebabkan terjadi penurunan kinerja Indofarma atau tidak ya, *tapi* yang jelas Pak Martin, mungkin ya, kebijakannya saja tidak tidak tidak salah, tetapi mungkin di level implementasinya ya, atau mungkin karena kurun waktu yang begitu pendek

ya, kita bisnis selama selama 100 tahun di bidang farma, tiba-tiba harus *shifting*, itu juga mungkin.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya, *tapi kan* Pak waktu Covid.

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (RIDWAN KAMIL):

Nah yang.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oseltamivir itu semua orang nyari, *wong* saya *aja* nyari, Pak.

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (RIDWAN KAMIL):

Betul, betul.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Sama apa tadi, Oseltamivir, kalau Ivermectin belakangan-belakangan, deh.

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (RIDWAN KAMIL):

Oseltamivir, Ivermectin, Desrem, ya.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Apa namanya?

KESEKRETARIATAN SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (RENNY LAILI DWI PERMATA LUBIS):

Obat suntik, Pak.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):



Heh, ada yang mifir-mifir lagi tuh, bukannya ada ya, iya Oseltamivir sama apa, gitu.

KETUA UMUM SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (MEIDA WATI):

Remdesivir.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Nah.

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (RIDWAN KAMIL):

Iya.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Itu *kan* semua orang nyari, masa su.

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (RIDWAN KAMIL):

Betul.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Enggak enggak terserap, aduh, enggak masuk akal sama saya Pak.

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (RIDWAN KAMIL):

Iya. Nah, iya. Jadi begini Pak, kita punya produk yang berkaitan dengan DOFI, apa, dengan Covid, itu namanya DOFI. Jadi, singkatan dari Desrem, Oseltamivir, Favipiravir ya, sama.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Favipiravir.



KETUA DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (RIDWAN KAMIL):

Ivermectin.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Saya ingat, *tuh*.

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (RIDWAN KAMIL):

Betul. Jadi istilahnya DOFI namanya, Pak.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kalau sampai enggak terserap *kan* aneh itu Pak. Itu herbal oke lah tadi.

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (RIDWAN KAMIL):

Iya, betul.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Karena itu *new business line*, lah yang ini.

KETUA BIRO KAJIAN STRATEGIS SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (MURSAL LUBIS):

Mungkin.

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (RIDWAN KAMIL):

Nah, mungkin dari Pak Mursal coba ditambahin.

KETUA BIRO KAJIAN STRATEGIS SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (MURSAL LUBIS):

Saya tambahin sebentar. Terima kasih atas kesempatannya. Khusus untuk Oseltamivir, itu *kan* 21 Juni 2021, lima organisasi kedokteran profesi



kedokteran, itu mengusulkan untuk Oseltamivir tidak lagi digunakan untuk penanganan Covid. Nah, kemudian di Januari 2022-nya oleh Kemkes diputuskan untuk tidak menjadi pilihan utama untuk penanganan Covid. Nah, oleh sebab itu, stok kita yang waktu itu sangat banyak ya, sudah didatangkan, akhirnya itu kita tidak bisa jual. Nah, waktu itu kita sudah protes juga ke, ke Kemkes lewat direktur, lewat komisaris dan sebagainya, tetapi itu keputusan tetap tidak bisa di ganti, *gitu* Pak. Nah, sejak itu sampai sekarang, posisi kita kalau di distributor, lebih kurang 14 miliar lagi Pak stok itu yang tidak bisa diapa-apakan, di di gem, di Indofarma, di distributor, di distributor, itu Pak untuk Oseltamivir. Kalau, apa namanya, si Ivermectin, itu habis Pak. Itu tidak ada lagi stok. Kalau Desrem, itu ada di Indofarma dan setahu saya itu ada beberapa yang dikembalikan ke *principal* ya?

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (RIDWAN KAMIL):

Iya.

KETUA BIRO KAJIAN STRATEGIS SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (MURSAL LUBIS):

Sudah diretur dan dibayar. Kemudian, Favipiravir itu juga stoknya sudah, di kita sudah habis, di distribusi, *gitu*. Terima kasih.

F-PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON):

Jadi yang 14, jadi cuma 14 miliar?

KESEKRETARIATAN SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (RENNY LAILI DWI PERMATA LUBIS):

Di gudang IGM.

F-PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON):

Di gudang? Yang 390 sekian miliar itu apa Pak? *Kan* yang Bapak bilang tadi semua habis, Ivermectin, yang ini habis, dikembalikan ke *principal*, dibayar kembali.

KETUA BIRO KAJIAN STRATEGIS SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (MURSAL LUBIS):

Itu mungkin dari yang disampaikan itu, bukan hanya kasus Oseltamivir terhadap terjadinya *fraud*. Itu dari berbagai kasus yang terjadi, totalnya, akumulasinya *segitu*, ya, tadi mungkin bisa dijelaskan lagi, Pak.

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (RIDWAN KAMIL):

Iya, jadi mungkin yang disampaikan oleh Pak Mursal, kebetulan Pak Mursal ini dari IGM Pak, jadi beliau ini yang menangani distribusinya, *sales and distribution*-nya, jadi terkait mengenai produk-produk Indofarma, itu yang menjualkan adalah dari Pak Mursal. Jadi tadi disampaikan bahwa, sebetulnya kalau untuk stok DOFI ya, Desrem, Oseltamivir, dan kawan-kawan, itu sudah tinggal sedikit lagi ya, Pak Mursal ya, sudah tinggal sedikit lagi, ya.

Yang, mungkin di Indofarma masih agak banyak ya Pak, Bang Jay, ya. Nah, pertanyaan dari Bu Sondang yang lain terkait mengenai operasional saat ini Indofarma, memang, apa, sesuai dengan arahan, bahwa Indofarma tahun 2023 itu di, apa namanya, dibatasi operasionalnya ya, 2023, 2024 ya, operasional dibatasi, contoh, misalkan seperti RKAP tahun 2023 ya, kita dipangkas dari 500 miliar, menjadi 250 miliar ya. Bahkan di, di IGM itu RKAP-nya menjadi 0, tahun 2024 ya? Itu Pak Martin, dan ini berdampak sekali terhadap kondisi perusahaan, ya. *Dulu* saja, yang RKAP kita normal di angka 500, 600 ya, ditambah kemudian IGM, sehingga *revenue* kita dalam setahun bisa diangka 1,2, 1,3, bahkan bisa lebih, 1,4, 1,5, kondisi perusahaan agak berat ya, apalagi kemudian pangkas, *gitu*. Jadi saya melihatnya bahwa di sini ada kebijakan yang barangkali mungkin, karena ada pembatasan-pembatasan itu yang kemudian 2023, 2024 kita berat kondisinya, ya itu terkait mengenai operasional.

Nah mengenai aset Pak, Bu Sondang, aset berdasarkan data yang kami ketahui, itu kurang lebih saat ini aset kita tinggal 80 miliar ya, sekitar 80 miliar Pak Martin aset kita, yang tersebar di daerah-daerah ya, *gitu*. Yang 700 sudah di tangan *holding* ya, *Holding* BUMN, Bio Farma ya, sama di pihak bank, *gitu*. Jadi saat ini yang masih di tangan kita, aset sekitar 80 miliar.

Nah, kemudian pertanyaan dari Pak Martin, saya coba akan jawab ya, terkait mengenai, betul bahwa memang kalau dari sisi DPR, perspektifnya adalah bagaimana memenuhi kepentingan tiga pihak ya, dalam ini negara, perusahaan, sama karyawan. Nah, kalau di kita memang perusahaan sama karyawan ya. Dan saya kira teman-teman Serikat Pekerja Indofarma ini tidak menuntut haknya saja, tetapi kita juga ingin memperjuangkan kepentingan perusahaan *gitu* ya, dalam konteks hari ini.

Nah, mengenai kondisi kinerja Indofarma bahwa mulai adanya penurunan, memang kita rasakan semenjak adanya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pengadaan e-katalog pada tahun 2013 ya kalau enggak salah. Dan itu terbukti dari 2013 sampai sekarang, posisi kinerja Indofarma terus mengalami penurunan. Secara SKU-nya saja, kalau *dulu* misalkan ketika pengadaan untuk pemerintah itu bisa di atas 100 SKU ya, Pak Mursal ya? Bisa 100, pas 2013 ke sini, semenjak e-katalog, itu terus

mengalami penurunan produknya, karena memang faktor, apa namanya, HPP yang kita memang sulit untuk bersaing dengan pihak swasta ya, *gitu*. Jadi, betul bahwa adanya kebijakan mengenai pengadaan e-katalog itu sangat berdampak terhadap kemampuan kita bersaing, terutama di sektor pemerintah ya. Dan itu mengalami penurunan terus Pak Martin, dari 75, 50, terus sampai saat ini, terakhir itu 2023, 2024, itu mungkin SKU kita di bawah 20 ya. Jadi, terus memang mengalami penurunan.

Namun demikian ya, kalau saya boleh katakan, bahwa sampai dengan tahun 2019, itu kita relatif bisa *survive* Pak Martin, ya, bisa *survive*. Meskipun memang *bottom line* kita masih negatif ya, tetapi kita masih relatif operasional berjalan dengan normal. Nah 2020, 2021, tambah lagi 2022, 2023, kita memang porak-poranda karena adanya *fraud*, adanya *fraud* dan adanya kesalahan tata kelola.

Dan itu kami dari serikat pekerja pernah melaporkan Pak, bukan pernah melaporkan, pernah menyampaikan. Saya ingat betul pada saat RDP tahun 2021, kebetulan kami menyampaikan ke salah seorang fraksi PAN ya, Pak Pak Daeng ya, waktu itu saya menyampaikan, bahwa di Indofarma ada potensi terjadinya *fraud*, dan itu disampaikan pada waktu itu, di pada saat RDP tahun 2021. Kami menyampaikan Pak, melaporkan, dan kami pun melaporkan ke pihak Kementerian BUMN ya, pada tahun 2021 ya, bulan 4, bulan 5, saya ingat betul. Menyampaikan bahwa tolong diperhatikan Indofarma ini, karena kalau tidak diperhatikan secara serius, 2-3 tahun ambruk, dan itu terjadi. Dan kami juga menyampaikan ke manajemen kami, setahu kami juga manajemen kami menyampaikan ke *holding*. Pada waktu itu diminta dilakukan audit investigasi ya, tetapi karena, saya enggak tahu ya, apakah terlambat kemudian ditindaklanjutinya, sehingga akhirnya terjadilah *fraud* tahun 2023, padahal kami sudah melaporkan dari 2021, ya.

Jadi saya melihatnya bahwa, mungkin dari pihak *holding* juga pada waktu itu kurang cepat ya, untuk menindaklanjuti masukan agar segera dilakukan adanya audit investigasi di Indofarma. Bahkan pada waktu itu, ketika audit itu dilakukan ya, malah ditunjuk kembali, pejabatnya ditunjuk kembali yang itu, kemudian sekarang terjadi yang diduga, ya.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Siapa tunjuk kembali?

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (RIDWAN KAMIL):

Yang ditunjuk kembali pada saat itu tahun 2000, ya jangan disebutkanlah namanya. Ketika ada audit dilakukan nih Pak, ya.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Direksinya itu?

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (RIDWAN KAMIL):

Sudah di, sudah dilaporkan ke pihak *holding*, bahwa Indofarma harus segera diaudit, dan itu diaudit pada waktu itu. Pada saat audit berjalan, malah ditunjuk kembali. Dan itu kemudian terjadi di tahun 2023, *fraud* yang dahsyat itu, yang 371.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Holding-nya masih Dirut yang lama?

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (RIDWAN KAMIL):

Iya, Dirut yang lama, *gitu*, *tapi* sekarang masih ada sebetulnya beberapa direktur yang lama ya, *gitu*. Jadi, saya sih melihatnya bahwa ini juga ada keterlambatan, ada pembiaran dari pihak *holding* ya, terkait mengenai yang terjadi di Indofarma ya Pak Martin, mohon ini dicatat, *gapapa*, saya ngomong apa adanya di sini, ya.

Jadi, kalau, kalau Indofarma pada waktu itu diperhatikan dan diaudit dengan betul oleh BPK, tidak akan terjadi seperti ini kalau menurut saya, ya. Karena sampai dengan 2019, sebelum terjadinya *fraud*, Indofarma itu masih bisa berjalan dikatakan normal operasionalnya. Jadi, kami ini adalah korban. Jadi yang *fraud* itu siapa, *kan* perusahaan, kami korban sekarang, *gitu*.

Jadi itu yang yang, jadi kalau tadi Pak Martin mengatakan bahwa apakah sampai sejauh ini Indofarma melaporkan, SP melaporkan, saya sangat aktif. Bahkan ketika itu, kebetulan kami *dulu* ketuanya.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ketua apa, Pak?

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (RIDWAN KAMIL):

Iya, *dulu* ketuanya serikat pekerja, saya.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oh.

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (RIDWAN KAMIL):

Saya sampaikan padahal waktu itu, bahwa awal mula terjadinya Indofarma *fraud* itu, pada waktu itu 2020 awal, Indofarma akan membuat SBU DME ya? SBU DME namanya, satuan bisnis unit baru ya, yang mengelola mengenai produk alkes. *Tapi* pada waktu itu sekaligus Indofarma menangani distribusinya, *sales and distribution*-nya, pada saat itu saya sampaikan, bahwa Indofarma ini manufaktur *gitu* ya, kita tidak punya pengalaman, kenapa enggak diberikan kepada IGM, *tapi*, dan itu bentuk bahwa kami sudah memberikan masukan *gitu* kepada manajemen, dan itu memang terjadi, malah bagian daripada *fraud* itu, *gitu*.

Jadi, itu yang saya sampaikan terkait mengenai sampai sejauh mana serikat pekerja memberikan masukan kepada manajemen, kita aktif ya, baik kepada manajemen, kepada *holding*, bahkan kepada pihak kementerian, dan terakhir juga kami melaporkan kepada pihak Komisi VI waktu itu ya.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Tapi ke anggota, ya?

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (RIDWAN KAMIL):

Iya, kepada anggota.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Berarti informal, ya?

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (RIDWAN KAMIL):

Betul.

SEKRETARIS JENDERAL SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (M ZAENUDIN):

Sudah disampaikan di RDP juga.

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (RIDWAN KAMIL):

Tapi sama pihak Anggota Komisi VI sudah disampaikan pada waktu itu di.

SEKRETARIS JENDERAL SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (M ZAENUDIN):

RDP.

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (RIDWAN KAMIL):

RDP yang pada waktu itu dengan pihak *holding*, ya. Ada rekamannya.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baguslah. Terus waktu pas ketemu *holding*, apa katanya, Pak?

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (RIDWAN KAMIL):

Nah, mungkin nanti Ibu Ketum yang bisa menjawab mengenai, sampai sejauh mana komunikasi dengan pihak *holding* terkait mengenai aspirasi yang kami sampaikan. Silakan, Ibu Ketum.

SEKRETARIS JENDERAL SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (M ZAENUDIN):

Baik,

Bismillahirrahmanirrahim,

Makasih Pimpinan, Bu Sondang, yang sudah menerima kami pada siang hari ini. Tentunya apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan kami, ada satu titik poin yang harus saya sampaikan di sini, yang juga harus disyukuri sebenarnya dari perusahaan dan juga *holding*, apa itu, sebenarnya karyawan Indofarma itu karyawan yang baik Pak, karyawan yang baik. Apa yang menjadi ukurannya? Kami tidak pernah melakukan apa-apa. Tadi sudah



disampaikan ke rekan kami bahwa, sudah kami berkorban *kok*, suruh enggak naik gaji kami terima, ya kan, hanya 50 kami terima, supaya apa, supaya operasional perusahaan ini berjalan. Itu adalah kunci bahwa kami itu berniat baik, dan serikat pekerja tidak pernah koar-koar ke sana-sini. Kami selalu membantu perusahaan memikirkan, kenapa kemudian jadi terjadi seperti ini.

Makanya pada *slide* kami Pak, mohon izin kami bilang ratapan, kenapa, kami sudah ngadu ke mana-mana Pak, ya, ke *holding*, ke sana, bahkan yang terakhir kami sudah ngadu enggak gajian itu ke Komnas HAM, kenapa, supaya tersentuh hatinya para pimpinan yang ada di Indofarma *Holding* itu bisa merasakan, bahwa kami ini adalah sudah berkorban untuk perusahaan tanpa kami jadikan korban yang berikutnya lagi. Harapan kami tidak tidak begitu, makanya kami datang ke sini, ini ratapan kami yang ke sekian kalinya, karena kami belum pernah meratap ke RDP Pak ya, teman-teman kami di sana hari ini menantikan Pak, apa yang menjadi keputusan dari Komisi VI.

Tadi sudah disampaikan Pak, kami berharap ada kepedulian dari Komisi VI karena tadi Pak Martin agak menyinggung kalau kami sudah rugi kemudian *kok* tiba-tiba minta *bailout*. Sebenarnya bukan Pak, kami ingin menagih apa yang menjadi pengorbanan karyawan, karena sudah sekian lama Pak kami menunggu janji-janji manisnya “Tolong bantu perusahaan”, “Mengerti perusahaan”, kami bantu Pak, artinya, hari ini kami mau ngadu ke mana lagi, Pak.

Makanya hari ini, Bapak ingin nanti ketemu dengan pemerintah, sampaikan Pak. Pengorbanan karyawan sudah cukup, Pak. Jangan dikorbankan lagi dengan, dengan apa, sekarang ada janji dirumahkan dan sebagainya, tolong itu jangan terjadi lagi, sudah berat, Pak. Apalagi mohon maaf, teman-teman ini buat menghidupi kehidupannya ada yang utang bank Pak, utang ke sana-sini yang bebannya sebenarnya berharap dari upah.

Nah, tadi Bapak tanya apa yang sudah di kami sampaikan ke *holding*, jujur saja Pak kalau kami mau sampaikan, bahwa kami ketemu dengan *holding* saja susah setengah mati. Sudah berapa kali kami ingin ketemu **perkembangan**, hanya sekali ya? Hanya sekali Pak kita ketemu. Bahkan kami tidak pernah ketemu dengan Dirut *Holding*, tidak pernah. Bayangkan, kami ini seolah, kenapa saya bilang ratapan di di *slide* kami Pak, karena, *kok* kayak kami anak tiri, susah, mau ketemu Pak Erick Thohir susah, ya. *Alhamdulillah* kami mau ketemu presiden masih diketemui oleh Kepala Staf Kepresidenan, masih bersyukur kami, karena saya, kami tahu kesibukan bapak presiden.

Tapi kami ke *holding* tidak pernah ditemui oleh Dirut, ini *fair-fair* saja ya Pak kami sampaikan, supaya mungkin Bapak bisa langsung menyampaikan, kenapa keluhan-keluhan daripada karyawan tidak pernah sampai. Bahkan ada sindiran, kenapa serikat pekerja diam ketika ada pejabat-pejabatnya yang

menari-menari di hujan lebat, kami tersinggung Pak perasaan itu, kenapa, karena kami menganggap karyawan kami baik Pak, suruh bantu, dibantu, Pak.

Jadi, kami sudah ngadukan ke *holding* dan meminta, Pak. Jadi, harusnya kami ditemui oleh Direktur *Holding*, Pak. Jadi kalau tadi Pak Martin bertanya apa yang disampaikan, ya keluhan kami Pak, mengenai *outstanding* kami yang boleh dikatakan itu pengorbanan kami senilai 95 miliar yang saat ini sudah terjumlah, sudah kami sampaikan Pak, minta kami, minta prodi segera, Pak. Sampai hari ini Pak, tidak ada mantan-mantan pejabat yang memakai rompi hijau, apa, *oren*, kami menunggu itu, Pak. Mungkin barangkali mereka, dari mereka kami bisa menarik uang kami. Harapan kami begitu Pak, ternyata tidak ada. 9, tahun berapa ya, sudah kami demo, harapan kami, ini sudah bulan yang ke-8, tidak ada Pak yang pakai rompi *oren*, barangkali ada uang kami di sana Pak, nilainya luar biasa.

Tadi tidak pernah pernah disinggung ada bisnis *markes*, masker Pak, ya. Itu luar biasa sebenarnya, Pak. Masih ada Pak sisa-sisa masker di sana. Kenapa *kok* kami mau ngadu Pak, ada masker yang sebenarnya bisa dijual ke rumah sakit, *kok* didiamkan saja ya, 90 miliar Pak, *kan* itu hak kami. Cocok dong kalau itu dijual, kemudian ada kebijakan dari pemangku jabatannya, Direksi Indofarma, Direksi *Holding*, ini bisa dong disampaikan ke Pak Erick Thohir, “Pak ini Indofarma punya punya aset Pak, punya masker yang bisa dijual”, *kan* gampang sebenarnya, taruh di rumah sakit, rumah sakit Indonesia banyak Pak, ya Bu, Bu Sondang ya Bu, masa jual masker *aja* enggak mampu.

Makanya itu Pak, kami berkali-kali mengirim surat ke Pak Erick Thohir, “Pak, kami mau ngobrol *gitu loh* Pak”, enggak dikasih, Pak. Kami unjuk rasa 2 kali Pak, tanggal 31 Januari 2024 sama 6 Mei 2024. Kami ingin ketemu Pak Erick Thohir kenapa? ke *holding* enggak bisa, Pak. Direktornya enggak mau nerima kami, direkur utamanya takut ketemu kami. Padahal saya sudah bilang, karyawan Indofarma ini karyawan yang baik, suruh *shift* 1, *shift* 2, *shift* 3 kita, kita lakukan Pak. *Tapi* hari ini, karyawan Indofarma menangis semua, pengorbanannya sia-sia, janji-janji manis yang *dulu* bilang “jangan gajian *dulu*”, kami sudah ikutin, 50.000 kami ikutin.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Jadi waktu ketemu *Holding* siapa yang terima, Pak?

SEKRETARIS JENDERAL SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (M ZAENUDIN):

Hanya Ibu Endang *aja* Pak, Direktur.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Apa katanya?

SEKRETARIS JENDERAL SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (M ZAENUDIN):

Direktur SDM Pak, ya kami menyampaikan keluhan ya, ya.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Apa kata dia?

KETUA UMUM SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (MEIDA WATI):

Saya tambah.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kata *holding*-nya?

KETUA UMUM SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (MEIDA WATI):

Saya tambahkan ya, Pak. Kami sudah cukup membantu dengan adanya SHL yang 600, kurang lebih 600 miliar ya Pak, angkanya berapa Pak? Sekitar 500 ya?

.....:

500 miliar.

KETUA UMUM SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (MEIDA WATI):

Kami tidak bisa membantu karena adanya Undang-Undang PT, seperti itu. Jadi, artinya menggantung juga Pak, tidak bisa berbuat banyak intinya, harus melihat lagi apa kebijakan dari kementerian. Sementara kami ke kementerian Pak, jawabannya sama, jawabannya sama, rasanya saya nih kalau ngomong *gini* selalu pasti menangis, ya Pak. Artinya *gini*, ketika kementerian melihat ada buku putihnya diselamatkan, *tapi* kami melihat *gini* ya Pak, dengan adanya PKPU, kemarin ada *udah* langsung ada homologasi. Okelah, mungkin kementerian, ini makanya saya mendorong supaya kenapa negara harus hadir dalam permasalahan kami, karena kami sudah tidak



punya apa-apa Pak, di Indofarma itu sudah punya, tidak punya apa-apa kalau Bapak melihat ya Pak, *fraud* ini membuat kami hancur-lebur.

Karena yang tertinggal sudah tidak ada lagi, aset yang sudah dijaminkan, aset, aset yang ditarik menjadi penjamin, itu sudah diambil, sudah dijaminkan ke Bio Farma atas utang-utang kami, SHL kami. Lalu ketika *fraud*, ketika ada PKPU, kalau Bapak boleh melihat, kami coba menggambarkan, mudah-mudahan *analisa* kami ini, apa, tidak salah.

Karena menurut kementerian, perahu Indofarma itu tidak lagi besar, akan dikecilkan. Lalu, bicara soal hak-hak kami akan dikecilkan, otomatis *kan* karyawannya akan di dilepas, seperti itu. *Tapi* ketika kami melihat aset kami Pak, bayarnya pakai apa? ketika melihat manajemen kami, kami berdiskusi, lalu hanya andalannya aset, aset, aset. Pak, sisanya hanya 80 miliar, utang kami, utang karyawan *aja*, perusahaan kepada karyawan *aja* sudah 95 miliar. Lalu kami pastikan, kami minggu lalu ketemu dengan Pak Asep, bagaimana nasib kami Pak. Kalau bicara soal aset, kami sudah, kami pastikan di depan mata, kami menjadi tulang dan kulit yang tidak bisa mendapat apa-apa, nyatanya dari, saya masuk di 2001 Pak, perusahaan ini selalu bilang *going concern*, oke kami ikut *going concern*.

Tapi nyatanya yang terakhir yang dilakukan adalah *fraud*. Ini mencabik-cabik kami, Pak. Tidak gajian, lalu manajemen sampai sekarang juga mau me-niat, merumahkan kami dengan gaji yang kecil. Kami makan apa Pak? Ada yang WA anggota kami bilang, "Bu tolong, berikan gaji kami", beras seliter enggak ada di rumah Pak, seliter, ini makanya saya selalu nangis. Mungkin dikatakan saya cengeng, tidak Pak, *tapi* terlalu sedih dengan kehidupan. 15.000 Pak seliter, dan kami tidak sanggup membeli itu. Dan ini saya suarakan ke mana saja, ke *holding* sudah Pak, ke kementerian sudah, ke Menaker sudah, unjuk rasa teriak-teriak Pak, kami sudah Pak.

Lalu nyatanya sampai sekarang, permasalahan kami tidak selesai. Lalu surat kami, ke mana pun sudah kami berikan dan kami punya harapan besar ke sini Pak, untuk didengarkan oleh DPR, karena ini adalah rumah rakyat. Tolong dengarkan aspirasi kami, bahwa sampai hari ini, kami belum dapat penyelesaian Pak. Kami meminta negara harus hadir, karena kalau bicara soal undang-undang PT, kami sudah tidak dapat apa-apa, Pak. Kalau Bapak bilang kenapa *fraud*, lalu kalian minta *bailout*, bukan itu Pak, karena kami tahu perusahaan secara aset tidak akan memberikan gaji kami, enggak akan sanggup bayar gaji kami Pak, enggak akan sanggup, karena selalu terutang. Kami selalu bilang sama manajemen kami, kami tidak butuh gaji yang terutang Pak, kami butuh makan sekarang, makan untuk sekarang bukan makan untuk besok, karena kenapa, makan sekarang kami butuhkan untuk membeli beras, membeli, membayar sekolah anak-anak, membayar listrik. Lalu kami membayar apa semuanya dengan apa.

Kalau itu semua terutang, Pak akan banyak karyawan Indofarma di luar sana akan melakukan kejahatan. Saya bukan mengancam Pak, Bapak pernah enggak dilihat, lihat TV karena kemampuan ketidakmampuan kepala keluarga mencukupi kehidupan anak-anaknya, dia membunuh, ini kami sampaikan juga ke Kemenaker, lalu akan, jawabannya apa, akan kami awasi, awasi, awasi. Nyatanya mana? Pengawasannya mana? Sampai saat ini kami lapar, mohon maaf suara saya besar ya Pak, karena ini terlalu sakit, kebetulan orang Batak juga ya, karena nadanya, mungkin into intonasinya, kami lapar Pak, artinya *gini* Pak, ini ke mana lagi kami teriakkan, demo *udah* ya Pak, bersurat sudah. *Holding* ketutupan mata, ya mungkin, mungkin lewat, ini harapan kami datang ke sini sangat besar Pak, karena enggak tahu lagi, ke mana lagi suara ini bisa diteriakkan supaya masalah kami selesai.

Karena kalau ketika kami berkuat-kuat di sini saja, bicara soal manajemen, selalu bilang enggak ada duit, enggak ada duit, *minimum operation*. Kalau Bapak bilang “Ke mana kalian ketika ini”, kami sudah bersurat, sudah masuk, sudah segala macam kami lakukan. Kami sudah teriak ketika *fraud* belum terjadi, ini akan ke sekian, akan terjadi seperti ini, sudah kami lakukan juga, *tapi* tidak ada yang mendengar, akhirnya terjadi, seperti itu Pak.

Lalu kami seperti apa sekarang, tidak ada kejelasan sedikitpun, Pak. Kalaupun sekarang sampai hari ini direksi ingin merumahkan kami, rasanya miris Bu, karena apa? merumahkan dengan gaji 2,7, dengan gaji-gaji terutang, kami mau makan apa meskipun mereka bilang, “*Kan* kalian bisa kerja, karena enggak di dituntut dengan pekerjaan yang-yang normal”, lalu kami jadi apa Bu, jadi tukang cuci Bu, jadi Gojek, lalu Gojek dengan segala macam sekarang kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja, apakah kami langsung dapat banyak penumpang, tidak Bu.

Makanya yang kami khawatirkan, ketika kami nanti, okelah kami tidak punya daya untuk melawan ini, ada *right sizing*, ya oke, yang kami melakukan kemampuan kami hanya, ya sudah, kalau *gitu*, negoisasikan angkanya, *gitu*.

Tapi saat hari ini saya meminta lebih, karena kami *ngadep* Komisi VI. Tolong dengarkan suara kami, bagaimana kami bisa diselamatkan, bayarkan utang-utang kami, negara harus hadir terhadap kami Pak. Karena apa, ini 1.100 orang Pak, belum lagi keluarganya, anak istrinya, katakanlah anaknya 3, istrinya 1, 4 kalau dikalikan 4 Pak, 4.400 yang akan menanggung penderitaan ini. Rasanya miris Pak, pasti akan selalu, ketika saya mengatakan ini selalu, apa ya, tidak bisa tidak menangis Pak, terlalu sakit Pak. Kalau Bapak bilang ini bukan waktu yang sebentar buat kami untuk menahan ini, cukup lama Pak. Dan kenapa harus kami teriakkan sekarang, memberanikan diri untuk maju, ini sudah level terendah, ketika gaji tidak bisa dibayarkan dan ini hanya terutang, ini level terendah Pak. Apa pun itu kebijakan direksi ataupun kementerian, saya meminta supaya negara harus

hadir melihat, bahwa kementerian ini menunjuk direksi-direksi kami, itu juga harus turut andil. Dan *holding* juga harus turut hadir dalam permasalahan kami, nyatanya kan belum ada juga, seperti itu Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, masih ada lagi?

PERWAKILAN INDOFARMA GLOBAL MEDIKA (IR. T. SYAIFUL AMANULLAH):

Boleh saya tambahkan, Pak?

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Boleh.

PERWAKILAN INDOFARMA GLOBAL MEDIKA (IR. T. SYAIFUL AMANULLAH):

Tadi Bapak bertanya mengenai *fraud*. Secara sopan dan santun dan wajarnya, bahwa negara itu harus melihat ini secara pertahanan dan keamanan kesehatan, Pak. Kalau mengenai *fraud*, kita bukan urusan kita Pak, kenapa, banyak kali Pak, bukan satu, bukan masker saja. Bukannya Bapak bilang tadi oseltamivirlah apalah itu, bukan Pak, itu kecil, sebenarnya gede Pak, mungkin Bapak sudah tahu sebenarnya, direksi kami juga sudah tahu yang baru ini, cerita ini sudah tahu, enggak usah kita ulang lagi Pak, enggak pantas di mulutnya, kenapa? urusan *fraud* dan penegak hukum, itu adalah urusan penegak hukum, harus dilaksanakan Pak. Kami nunggu, kapan ya orang-orang ini, yang ngembat duit itu bisa masuk penjara Pak, uangnya diambil, disita dong hartanya. Masa sih penegak hukum enggak bisa sekuat itu, *cemen loh*, Pak. Maaf ya Pak, saya agak-agak gila kalau udah mikir kayak *gitu*, kenapa, terlalu *cemen*, Pak. Komisi VI nanya kami, ya enggak pantas Pak kami tanya, wah ini gara-gara Panbio, ini gara-gara masker, ini gara-gara TeleCTG, ini gara-gara itu, gara-gara ini, banyak Pak. Kalau Bapak hitung-hitung Pak, ngembalikan duit itu pun tak sanggup Pak, manusia-manusianya main pinjol, main ini, itu manusia Pak, bukan perusahaan, *tapi*, memakai nama perusahaan Pak, ini intinya Pak, kami sudah pergi, maaf ya Bu Ketua ya, saya bongkar *ajalah*, biarlah.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya.

PERWAKILAN INDOFARMA GLOBAL MEDIKA (IR. T. SYAIFUL AMANULLAH):

Bagaimana ceritanya, saya buka Pak. Kami sudah pergi ke rumah Pak Prabowo, kami sudah kasih surat, karena Pak Prabowo sibuk, tak bisa kita datang ya Bu, ya. Enggak apa-apa Pak, sampai tengah malam *tuh* sama Ibu Ketua, saya bawa Pak ke tempat Pak Prabowo. Kami juga sudah ketemu Pak, Ketua Umum Pandawa Lima, Jenderal Eko Wiratmoko, kurang apalagi Pak kami minta tolong. Kalau *udah* hebatnya lagi, ke DPR *udah*, ke mana, wah, *capek*, Pak. Ini *fraud* bukan urusan Indofarma, urusannya ada di penegak hukum pak, tangkap, penjarakan, itu baru hebat. Ini duit-duit negara Pak, bukan duitnya Ibu Meida, bukan duit Haya Saiful, bukan, *tapi* ini duit negara.

Ini bukan kasus satu biji istilah kasarnya, maaf ya Bu ya, saya orang Medan ini sebenarnya. Bukan gara-gara satu kasus, kasus ini banyak. Kalau Bapak cerita masker Pak, apa yang kata Pak Bang Jay tadi, 1 juta boks, 2 juta ya? 2 juta Pak, mau jadi apa negara republik ini. Mana kontrolnya? Tidak ada, *tapi* saya, mohon maaf Pak, saya di IGM, saya agak marah kalau dengar orang, bahwa semua itu kesalahan itu adanya di IGM, tidak, saya bisa jawab Pak, kenapa, karena orang pimpinan maupun manajer yang ditaruh ke IGM itu bukan orang IGM. Orang yang dikirim, yang disuruh, yang di yang di yang di, apa? yang diresmikan istilah kasarnya, ditaruh ke IGM, mainlah dia, itu Pak. Setelah itu main apa? Itu urusan penegak hukum, mana laporan BPK-nya? Bapak sudah baca belum? Coba Bapak baca, siapa yang korupsi, kami? Enggak mungkin, Pak. Apalagi Bapak datang Pak, Bapak silakan datang ke Indofarma Pak, Bapak silakan datang ke IGM Pak, hampir semua karyawannya baik-baik Pak, korupsi *aja* takut Pak, jangankan *gitu*, minjam duit 5.000 perak dibalikin Pak, sama teman ya Bu ya, betul.

Tapi, sampai akhirnya karyawan meninggal pun, meninggal dunia Pak, harus beli kain kafannya kita kompromi *dulu*, Pak. Mana ini, ini Negara Republik Indonesia *loh* Pak, saya di dada saya ini ada Garuda Pak, kenapa saya pasang? karena saya cinta tanah air, *tapi* mana, ini BUMN, badan unit negara, punyanya negara punya, kami berkali-kali Pak ke tempat Pak Erick Thohir, yang katanya Pak Erick Thohir itu suka main bola ya Pak ya, *gitu loh*.

Tapi apa artinya Pak kami, ini karyawan *loh* Pak, bukan bola, ini karyawan *loh* Pak, bukan perusahaan. Perusahaan yang mempekerjakan karyawan, karyawan disiksa, *gedebak gedebak gedebak*, hancur, terus karyawannya makan apa, Pak. Oke saya terima, direksi kami yang baru pasti akan diam, pasti Pak, karena itu sebenarnya bukan urusan dia, bukan urusan orang itu, Pak. Penegak hukum yang harus melaksanakan ini, sehingga hak-hak karyawan dikerjai, siapa lagi kalau enggak bantu negara, oh enggak bisa pun Pak Syaiful, namanya ada *fraud*, iya *fraud*, *fraud* urusan negara Pak.

Anggaran turunan, bantu kami, kalau perlu pekerjakan lagi semua karyawan Indofarma, dipekerjakan lagi, diberikan investasi yang benar, diawasi, sehingga maju. Jangan cerita *fraud* Pak, jangan cerita, *hoi* siapa ini, enggak, bukan Pak. Kami menangis Pak, Bu Meida itu hampir tiap hari menangis Pak, Ibu Ketua kami, Pak Syaiful gimana caranya ya, ayolah Bu, kita pergi ke sini, kita pergi ke sana, sedih Pak. Kami ini profesional, semua jago-jago farmasi semua Pak, Bapak kalau ngelempar batu ke Indofarma itu Pak, lempar ke atas, jatuh ke kepala farmasi Pak, saking banyaknya orang farmasi, hebat-hebat dan jujur-jujur, enggak ada itu Pak, mereka mana berani itu, ngembat duit ratusan miliar itu, enggak mungkin Pak, enggak mungkin Pak, itu mungkin tambahan cerita saya, jangan sampai Komisi VI DPR RI ini terpengaruh oleh hal-hal yang seperti ini.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Enggak-enggak, enggak ada terpengaruh Pak.

PERWAKILAN INDOFARMA GLOBAL MEDIKA (IR. T. SYAIFUL AMANULLAH):

Misalnya Pak, jangan sampai, Pak, kami mengharapkan itu, kenapa, kami lapar banget Pak, parah Pak, kalau Bapak lihat di Indofarma, di IGM, kasihan Pak.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Oke.

PERWAKILAN INDOFARMA GLOBAL MEDIKA (IR. T. SYAIFUL AMANULLAH):

Direksinya pasti diam. Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya, saya nanya begitu Pak, saya mau tahu, bagaimana perasaan Bapak/Ibu sebagai karyawan Indofarma, menghadapi kondisi perusahaan sekarang ini, di mana memang, per pengrusakannya itu terjadi bukan seka, sekali dua kali.

Nah itu maksud saya, saya ingin mendalami itu. Dari saya mendalami itulah nanti saya bisa mendapatkan apa yang menjadi, bukan hanya *concern* soal yang sudah ditulis oleh Bapak/Ibu ini, kalau ini, kalau hanya *concern* soal

ini saya bisa baca dengan surat Bapak/Ibu ya, *tapi* kalau mendengar langsung saya bisa menangkap apa yang menjadi isi hati dan ya, yang ada pada Bapak/Ibu sekalian.

Nah, jadi, terkait dengan hadirnya negara saya setuju. Nanti kami akan cari caranya Pak, dengan Menteri BUMN ya, kita jadwalkan rapat dengan Menteri BUMN itu terkait, apa namanya, APBN, RAPBN, Senin, ya? Senin ya, 2 September 2024, saya minta sekretariat untuk memasukkan topik ini, tema ini ya ke dalam, dalam agenda rapat. Dan saya tidak bisa berjanji apa solusinya karena, itu urusan eksekutif, *tapi* kami akan, yang bisa saya janjikan kami akan menyuarakan suara Bapak/Ibu sekalian pada saat rapat kerja dengan Menteri BUMN, ya Bu Sondang ya? Bu Sondang datang hari Senin, karena cuman kita berdua nih yang nerima, ya kan.

Nah, jadi nanti kita akan bawa dalam rapat. Mekanismenya seperti apa? itu nanti kita lihat Pak ya, karena mem-*bailout* perusahaan yang dalam kondisi sekarang itu juga kita harus lihat aturan hukumnya Pak, ya *kan, kan* tidak bisa sembarangan uang negara itu masuk ke perusahaan yang sedang bermasalah. Nanti, *tapi* saya lagi coba mikir-mikir tadi apa alternatifnya ya, nanti kita lihat pada saat rapat, apa juga yang menjadi kebijakan dari Menteri BUMN ya, Saudara Menteri BUMN. Yang jelas, apa pun nanti solusinya, saya ingin *concern* dari serikat pekerja itu masuk dalam pertimbangan, masuk dalam kalkulasinya Menteri BUMN ketika membuat skema penyelesaian masalah Indofarma ini. Paham ya? Paham.

Nah, apakah itu memuaskan semua pihak, belum tentu juga Pak ya. *Tapi* kami akan berusaha semaksimal mungkin ya, supaya bisa dalam skema penyelesaian itu, yang menjadi hak-hak karyawan itu, bisa diperhitungkan ya Pak ya, ya Ibu Ketua dan semua ya, saya pikir itu ya, enggak ada lagi yang lain kan? Masih ada?

SEKRETARIS JENDERAL SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (M ZAENUDIN):

Izin Pak, Pak. Menambahkan *aja*, Pak.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Singkat-singkat *aja* ya.

SEKRETARIS JENDERAL SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (M ZAENUDIN):

Terima kasih, Pak. Aduh, saya senang sekali Pak mendengarnya bahwa Bapak akan berusaha memperjuangkan hak kami, terutama yang 95

M Pak. Itu uang kami Pak, yang kami korbankan buat perusahaan. Saya enggak tahu caranya dari mana negara akan membantu, apakah akan memberikan aset-aset kami dibeli seperti persediaan, enggak tahu juga Pak, karena kami juga selalu meminta, *tapi* yang harus menjadi concern

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pak, kalau ada catatan mengenai stok, apa tadi, masker ya?

SEKRETARIS JENDERAL SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (M ZAENUDIN):

Iya, masker.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Masker yang belum terjual.

SEKRETARIS JENDERAL SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (M ZAENUDIN):

Iya.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Tolong dilengkapin.

SEKRETARIS JENDERAL SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (M ZAENUDIN):

Boleh Pak, boleh siap.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Dikirim secara tertulis ya.

SEKRETARIS JENDERAL SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (M ZAENUDIN):

Boleh, Pak.



KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Nilainya berapa, ya kan, apa *aja* itu di situ yang sebenarnya masih bisa dijual.

SEKRETARIS JENDERAL SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (M ZAENUDIN):

Iya.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Bukan jual aset, maksudnya jual, I

SEKRETARIS JENDERAL SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (M ZAENUDIN):

Jual kelebihan Pak, betul.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Indofarma ini gak jual suplai kan? Jual produk kan?

SEKRETARIS JENDERAL SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (M ZAENUDIN):

Izin menambahkan lagi. Jadi *gini* Pak, kami pernah *dulu*, karyawan ya Pak, dalam hal ini karyawan, dibantu hak-haknya oleh *holding*, pernah juga Pak, nilainya sekitar 36 M ya kalau enggak salah. *Tapi* dalam perjalanannya, karena kami tahu Pak dapat bocoran, oh ini buat membayarkan hak-hak karyawan dari holding. *Tapi* dalam perjalanan, kok tidak sampai *gitu loh, gitu* ya, kayak teman-teman ya, semua sepakat ya, bahwa, nah ini jangan sampai terjadi lagi, Pak. Bapak sudah berjuang, kemudian ada *BOX* buat membayarkan 95, ini pengorbanan kami yang harus dibayarkan, tiba-tiba pada saat akhirnya, buat vendor, buat bayar yang lain *gitu loh*, Pak. Itu yang kami khawatirkan. Ini terjadi Pak, nyesek kami Pak, kami dari SP tahu, oh, mohon maaf Pak ya kalau kami dapat bocoran surat bahwa, ada 36M untuk membayar hak karyawan, dalam perjalanan, kok tidak ada Pak, ya.

KETUA UMUM SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (MEIDA WATI):

13 miliar doang.



SEKRETARIS JENDERAL SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (M ZAENUDIN):

13 miliar, hanya 13 miliar itu Pak, padahal totalnya besar waktu itu ya, 3, dari 571M ada hak karyawan yang dibayar.

KETUA UMUM SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (MEIDA WATI):

157.

SEKRETARIS JENDERAL SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (M ZAENUDIN):

157 ya, ada 36. Dan ini, ini yang saya, kami khawatirkan. Jangan-jangan Bapak, maaf Pak Martin sudah mau berjuang, ada *BOX 95* yang buat karyawan entah dari mana negara dapatnya, *tapi* dalam perjalanannya, enggak muncul lagi *gitu loh* Pak, menguap lagi ini Pak, jangan khawatir ya Bu Sondang, tolong dijagain Bu. Hari ini karyawan kami Pak, mau bayar sekolah Pak enggak punya uang, mau beli beras enggak punya, ini benaran Pak cerita. Bahkan sudah ada yang mikirin lagi, kerja mikir, *stroke* Pak, ini terjadi Pak, *udah* tiga orang Pak yang *stroke* ya, tiga orang yang *stroke*, kenapa, setiap hari mereka bekerja mikirin berangkat kerja, pakai uang, bayar sekolah, pakai uang, makan, pakai uang.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Yaudah.

SEKRETARIS JENDERAL SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (M ZAENUDIN):

Gitu ya Pak, ya.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya.

SEKRETARIS JENDERAL SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (M ZAENUDIN):

Mudah-mudahan Pak Martin bisa mengawali ini.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kalau itu saya sudah pasti paham, Pak.

SEKRETARIS JENDERAL SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (M ZAENUDIN):

Bahwa kalau memang itu hak kami dibayarkan, benar-benar sampai ke karyawan. Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Masih ada? Silakan.

KESEKRETARIATAN SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (RENNY LAILI DWI PERMATA LUBIS):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Saya Renny, sampai saat ini saya menjabat sebagai apoteker penanggungjawab di Indofarma Global Medika pusat. Yang pertanyaan Bapak yang tadi, yang mengatakan jika e-katalog mengganggu, produk Indofarma berarti tidak kompetitif, *kan* Ibu, Bapak bilang kayak *gitu kan*. Saya juga akan memberikan alasan ke Bapak, kenapa Bapak *tuh* memang harus menyelamatkan Indofarma, bukan karena kami tidak mempunyai produk Pak, pada, walaupun e-katalog itu sudah ada, kami itu ada penunjukan langsung dari Kementerian Kesehatan mengenai program-program pemerintah, misalnya Indofarma Global Medika itu kita, anti rabies, kita Indofarma yang ditunjuk. Untuk penanganan AIDS, penanganan TB paru, penanganan gizi buruk anak, lalu kita juga ditunjuk langsung untuk distribusi vaksin pada saat Covid, PMT, sampai sekarang PMT *kan* juga harusnya *tuh* menjadi *concern* untuk di BUMN ya, harusnya Pak. Nah.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Apa PMT itu?

KETUA 2 SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (JEPRI USNANDAR):

Makanan tambahan, Pak.

KESEKRETARIATAN SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (RENNY LAILI DWI PERMATA LUBIS):

Makanan tambahan untuk ibu hamil, kita sekarang *kan stunting* Pak yang, *stunting* itu *kan* program pemerintah yang sekarang itu masih berlangsung dan akan cukup lama berlangsung adalah untuk *stunting*. Nah, kami juga satu-satunya distributor, IGM itu waktu itu, PMT ke 3.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Itu kita SPB-nya *aja* sampai setebal apa *gitu*, di seluruh kabupaten di Indonesia, bahkan di, sampai Papua *gitu*. Kita punya 29 cabang Pak, *tapi* kita *tuh* digerus, sampai sekarang *tuh* ditutup 4 cabang, ditutup berapa cabang, menurut saya, perusahaan itu, aset terbesar dari perusahaan adalah karyawan, *tapi* kami yang paling disiksa oleh perusahaan sampai sekarang.

Jadi menurut, jadi menurut saya, Indofarma itu masih sangat *compatible* untuk mendukung kesehatan masyarakat Indonesia. Sampai saat terakhir kami tidak bisa lagi mendistribusikan barang, karena barang di gudang kami sudah kosong, itu saya sampai dihubungi dengan Dinas Kesehatan Semarang karena pada saat itu, kita *kan* lagi *mental health*, di Indonesia ini penyakit *mental health* lagi marak-maraknya ya Bu. Di Dinas Kesehatan itu produk Amitriptyline itu habis, sampai tidak ada lagi, dan waktu itu distributornya hanya IGM, dan yang produksi hanya Indofarma, itu tidak bisa kami *supply* gara-gara keadaan perusahaan yang sudah tidak lagi dipercaya, *gitu*.

Jadi, bukan berarti Indofarma itu tidak bisa bangkit, *tapi* pengelolaannya harus ketat, menurut saya, manajemen itu harus ketat. Yang bagian informasi apa yang sudah kami lakukan, saya sebagai pribadi sudah berkali-kali di setiap audiensi dengan manajemen, itu saya sudah melihat beberapa kemungkinan-kemungkinan yang amat sangat nyala dari MOU, misalnya yang TeleCTG, itu sudah saya ajukan, sudah kami ajukan untuk di, diminta retur. Itu barangnya sekarang *tuh* masih ada di gudang kami, 10 miliar, *tertonggok* dan itu harusnya bisa retur sesuai dengan MOU, saya sudah sampaikan berkali-kali, kami sudah, sebagai karyawan kami tidak bisa lagi melebihi kapasitas kami sebagai karyawan, karena kami sudah mengajukan ke manajemen, *tapi* yang tidak dilakukan atau pengawasnya kurang.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Barang apa itu yang 10 miliar?

KESEKRETARIATAN SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (RENNY LAILI DWI PERMATA LUBIS):

TeleCTG Pak, itu masuk ke dalamnya BPK, TeleCTG.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Makanya *gini*, jadi menurut Bapak/Ibu *tuh* masih bisa, artinya menghasilkan, tolong kami dikasih.

KESEKRETARIATAN SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (RENNY LAILI DWI PERMATA LUBIS):

Iya.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Datanya ya.

KESEKRETARIATAN SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (RENNY LAILI DWI PERMATA LUBIS):

Iya, iya baik.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Nanti secara tertulis, karena kalau, *kan* kami-kami ini bukan farmasi, bukan orang farmasi seperti Bapak/Ibu, kami juga enggak paham apa-apa *aja tuh* yang masih bernilai jual di situ ya.

KESEKRETARIATAN SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (RENNY LAILI DWI PERMATA LUBIS):

Dan yang paling parah adalah, dari Januari sampai sekarang kami gajinya dipotong, slip gaji kami masih 100% dan pajak penghasilan kami masih diakui 100%, padahal uangnya kami tidak terima, begitu Pak.

KETUA UMUM SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (MEIDA WATI):

Satu lagi Pak, terkait BPJS-TK, Pak. Ini *kan* sudah dipotong juga ya sama DPLK juga, artinya *gini* Pak, ketika kami bekerja, kami tidak punya asuransi kesehatan, jadi ini sudah terjadi tiga orang Pak, ada kecelakaan kerja, namun itu tidak bisa di-cover sama, sama rumah sakit. Makanya kami ketika mau membayar, ini jadi kendala. Nah ini juga jadi kekhawatiran kami ketika kami berangkat kerja, Pak. Apa yang menjadi menjamin, ketika kami jatuh pada saat ingin berangkat kerja, *tapi* tidak ada pelayanan kesehatan. Sebenarnya, rasanya ingin berpikiran negatif ya Pak karena sudah terpotong, ketika ngomong ini ke Kemenaker, ini tindakan pidana. *Tapi* kami tidak mau

melangkah sejauh itu Pak, kami bisa saja melaporkan ini *gitu, tapi* makanya kami selalu berpikiran positif dan ingin menyuarakan ini, tolonglah, apa-apa yang sudah menjadi hak kami dan sudah terpotong, segera lakukan pembayaran, karena ini menjadi sangat sulit bagi kami ketika, contohnya BPJS-TK ini tidak dibayarkan, lah jaminan kesehatan kami ketika kami bekerja seperti apa, *gitu* Pak. Lalu teman kami ini, Pak.

BENDAHARA 2 SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (PIYAN SUPIAN):

Sedikit menambahkan, Pak.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya,

BENDAHARA 2 SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (PIYAN SUPIAN):

Ini barang mewah buat kami Pak, karena kami masuk kerja, tidak dikasih makan Pak. Sedikit pun kita meminta kejelasan tentang uang makan dan setiap hari kita harus kerja *tapi* tidak dikasih makan, kurang sabar seperti apa kami, Pak. Minum juga susah kami Pak, kita masuk kerja *tapi* tidak dikasih makan Pak, kami sangat sabar Pak, sedikit itu *aja* Pak, penutupan dari saya, terima kasih.

KETUA UMUM SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (MEIDA WATI):

Tambahan, ini banyak jadinya Pak. Terkait dengan DPLK juga kemarin sudah diblokir, jadi agak susah ini orang yang pensiun juga, agak tertahan, seperti itu, meskipun kami kemarin, ya mungkin ada upaya manajemen bilang ini salah kenapa DPLK-nya bisa dicairkan, *tapi* ini tidak lebih dari ada usaha kami, apa yang kami lakukan ketika kami tidak digaji Pak, kami *kan* tidak mungkin juga seperti meskipun saya bilang, apakah ada kepala keluarga yang bisa membunuh anaknya ketika tidak sanggup terhadap perekonomian, *tapi kan* kami masih berusaha juga, jangan sampai ini terjadi *gitu*.

Untungnya saja kami ingat Tuhan Pak, kalau enggak ingat Tuhan, mungkin sudah, sudah lama kali kami membunuh keluarga kami, karena enggak bisa makan, itu Pak, karena setiap hari butuh makan, perut ini enggak bisa berhenti, berhenti makan Pak, mungkin kami bisa puasa, *tapi* anak-anak kami untuk belajar, “Nak enggak ada duit beli beras”, itu tidak mungkin terjadi Pak kami ceritakan seperti itu.

Lalu, bicara soal, oke Pak tadi balik lagi, bicara konsep Indofarma ini enggak bisa berdiri lagi sebesar ini, saya pikir ini salah, *gitu*. Ketika Indofarma ini dikecilkan, bagaimana dengan ketahanan nasional, bicara soal, ketika

seperti ada pandemi Covid kemarin, meskipun ada kebijakan-kebijakan yang akhirnya membuat produk-produk DOFI itu tidak bisa keluar, *tapi* saya rasa kenapa tadinya dalam sejarah dibentuknya Indofarma, dibentuknya KF, ini *kan* untuk pertahanan terhadap negara, kesehatan masyarakatnya. Bagaimana Bapak kalau bisa bekerja, kalau sakit, ya *kan*. Kalau misalnya kita tidak punya subsidi terhadap obat, bagaimana karya, bagaimana rakyat Indonesia bisa sehat kalau pabriknya saja sudah dibuat kecil, artinya pasti ada sesuatu yang penting, kenapa negara ini membentuk Indofarma, membentuk Kimia Farma secara bersamaan, saya rasa itu ya Pak.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik.

KETUA UMUM SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (MEIDA WATI):

Dan satu lagi Pak, walaupun itu terjadi, harus terjadi kami di *right sizing*, tolong Pak, jagain pesangon kami Pak, jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami jadi tulang dan kulit saja Pak, yang enggak ada apa-apa. Mungkin secara Undang-Undang Ciptaker bilang, ketika perusahaan pailit secara 2 sampai 3 tahun berturut-turut bisa dilakukan pesangon 0,5, *tapi* kami hadir di sini, percaya, bahwa negara harus hadir, makanya kami percaya pesangon kami pun akan diberikan layak secara manusiawi, dan kami bisa melanjutkan kehidupan kami, ketika itu terjadi, diluluskan oleh perusahaan, kami bisa meneruskan hidup kami, makan, seperti itu Pak.

Yang kedua, boleh enggak kami Pak, serikat pekerja meminta kepada Komisi VI supaya kami bisa bertemu dengan Pak Erick Thohir langsung, bicara soal apa sih sebenarnya kebijakannya. Mungkin ini sangat, apa ya, sangat tinggi, *tapi* ini harapan kami, atau langsung bertemu dengan presiden *gitu*, melihat, Pak ini kami sudah tidak makan, seperti itu Pak.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya.

KETUA UMUM SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (MEIDA WATI):

Apakah itu memungkinkan? Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya, bersurat saja mereka lagi.

KETUA UMUM SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (MEIDA WATI):

Sudah Pak, sudah tiga kali, Pak.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Gini ya, gini, kalau soal dengan mitra kerja Komisi VI termasuk Menteri BUMN ya, rapat-rapat Komisi VI itu, rapat seperti ini itu, terbuka. Jadi, silakan *aja* dilihat, kalau mau datang, boleh, ya. Nah, jadi kalau untuk mempertemukan, ya saya pikir ya, urusan, *kan* sekarang, Bapak-Ibu bersurat dengan Komisi VI kami terima dalam audiensi ini, ya kita lihat juga pihak-pihak yang lain seperti apa, ya. Jadi kalau itu, saya rasa, silakan, nanti kalau pada saat rapat juga ingin menyaksikan, kami persilakan, karena rapat di DPR ini terbuka untuk umum ya, saya pikir cukup ya, *concern*-nya.

SEKRETARIS JENDERAL SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (M ZAENUDIN):

Pak, izin Pak, boleh kami itu bawa spanduk Pak, mau dibentangkan sebentar bisa ya Pak, ya?

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Nanti *aja*, saya tutup *dulu*, saya tutup *dulu*.

SEKRETARIS JENDERAL SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (M ZAENUDIN):

Oh iya iya, silakan Pak.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Nanti kita foto di sini, boleh.

KETUA UMUM SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (MEIDA WATI):

Pak, satu lagi Pak, boleh enggak Pak? Banyak banget nih permintaan saya jadinya. Boleh enggak Pak, ketika ini sudah kami lakukan permintaan kami, boleh enggak gaji kami dinormalkan? Bagaimana itu konsepnya saya tidak tahu, *tapi* kami sangat berharap gaji normal lagi, Pak.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya, nanti kita lihat Bu pembahasannya seperti apa, *kan* bukan Komisi VI juga yang punya.

KETUA UMUM SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (MEIDA WATI):

Ya

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Kami *kan* hanya.

KETUA UMUM SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (MEIDA WATI):

Ya, itu harapan kami, Pak.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Nah, ya.

KETUA UMUM SERIKAT PEKERJA INDOFARMA (MEIDA WATI):

Harapan kami.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Ya, yang eksekutifnya itu bukan di sini, *tapi* tugas kami menyampaikan *concern* dari Bapak/Ibu sekalian ya, tadi kami sudah juga, bersama Bu Sondang, mengatakan kami akan sampaikan pada saat raker, dan kalau nanti ada skema untuk penyelesaian masalah Indofarma, kami akan ingatkan bahwa ada *concern* karyawan yang ada di sana, bagaimana skema penyelesaiannya ya, itu yang bisa kami lakukan sebagai lembaga legislatif ya, saya pikir itu ya.

Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Serikat Pekerja Indofarma. Seperti saya katakan tadi, untuk selanjutnya, seluruh masukan dan penjelasan dari Serikat Pekerja Indofarma akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN guna mencari solusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Dengan demikian, izinkan saya untuk menutup rapat dengar pendapat umum pada hari ini.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.13 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP. 197104071992032001

